

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KOORDINASI FILANTROPI DENGAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DALAM PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI RIAU
(STUDI PILAR SOSIAL)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



WANDI SAPUTRA
NPM : 177110522

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin serta senantiasa mengharap Rahmat dan Ridho Allah SWT, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini yang penulis berjudul dengan **“Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi TujuanPilar Sosial)”** Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menempuh wawasan penulis tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai

pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan seluruh dosen jurusan ilmu administrasi publik yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menulis skripsi ini.
4. Bapak Eko Handrian, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik dan selaku pembimbing yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu dan menyediakan waktu dan membagi pengetahuan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Yang sangat Teristimewa dengan ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak

pernah lelah, selalu sabar dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah bertepi untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.

6. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 jurusan Administrasi Publik terutama pada Organisasi Himia Publik, serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya yang tidak dapat saya cantumkan disini.

Naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca penelitian ini, untuk kesempurnaan skripsi penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 8 November 2021
Penulis

TTD

Wandi Saputra
Npm.177110522

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II	17
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	17
A. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Administrasi.....	17
2. Konsep Organisasi.....	18
3. Konsep Manajemen.....	19
4. Konsep Administrasi Pembangunan.....	20
5. Konsep Koordinasi.....	23

6. Konsep Kemitraan	29
7. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB).....	32
8. Filantropi	37
B. Kerangka Pikir	39
C. Konsep Operasional	40
D. Operasional Variabel	44
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. <i>Key informan</i> dan <i>Informan</i> Penelitian	47
D. Teknik Penempatan <i>Informan</i>	48
E. Jenis dan Sumber Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Analisis Data	53
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	57
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	58
BAB IV	60
Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
A. Gambaran Umum Provinsi Riau	60
B. Gambaran Umum Dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau	62
C. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Dompot Dhuafa.....	72
D. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Tanoto Foundation	76
BAB V.....	78
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	78

A. Identitas <i>Key informan</i> dan <i>Informan</i>	78
B. Pembahasan Penelitian Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintah Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial).....	79
1. komunikasi.....	81
2. kesadaran pentingnya koordinasi	95
3. Kompetisi Partisipan.....	102
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi.....	112
5. Kontinuitas Perencanaan.....	124
C. Faktor Penghambat Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial)	132
BAB VI.....	134
PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN.....	140

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1	Proses Penyusunan Recana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Riau 4
I.2	Tabel Program Filantropi pada Matrik Non-Pemerintah Provinsi Riau ... 11
II.1	Konsep Operasional Variabel Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial).. 44
III.1	Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian 57
V.1	Identitas <i>Key informan</i> 78
V.2	Identitas <i>informan</i> 79
V.2	Anggaran Filantropi 111
V.3	Anggaran Pelaksanaan <i>SDGs</i> Pemerintah Provinsi Riau112

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Alur Pelaporan, Umpun Balik dan Koordinasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	13
I.2 Alur Pelaporan, Umpun Balik dan Koordinasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	14
II.1 Kerangka Pikir koordinasi filantropi dengan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi riau (studi pilar sosial).....	39
III.1 Komponen dan analisis data	55
IV.1 Struktur Organisasi BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau.....	71
IV.2 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Provinsi Riau	75
IV.3 Struktur Organisasi Tanoto Foundation Provinsi Riau	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Daftar Wawancara Informan Dan Key Informan Penelitian	140
2 Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi.....	167
3 Surat Keterangan Jurnal Online	168
4 Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi.....	169
5 Sertifikat Baca Al-Qur'an	170
6 Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	171
7 Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	172
8 Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau	173
9 Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Dompot Dhuafa Provinsi Riau	174
10 Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Tanoto Foundation Provinsi Riau	175
11 Dokumentasi Wawancara Dan Observasi Penelitian Tentang Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan..	176

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wandi Saputra
NPM : 177110522
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Desember 2021
Pelaku Pernyataan,



Wandi Saputra

**KOORDINASI FILANTROPI DENGAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DALAM PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI RIAU
(STUDI PILAR SOSIAL)**

ABSTRAK

WANDI SAPUTRA

Untuk mengetahui koordinasi Filantropi dengan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia badan perencanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau studi pilar sosial dilihat dari sangat lambat perkembangan *SDGs* karena kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya belum dilaksanakan secara optimal sehingga perlunya koordinasi. Provinsi yang pertama kali berkomitmen untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Mengikuti amanah peraturan presiden nomor 59 tahun dan peraturan Gubernur no 33 tahun 2018 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan *SDGs*. Pada pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang tertera pada keputusan Gubernur nomor 1002/VI/2020 tentang tim koordinasi daerah *SDGs* di Provinsi Riau. Keterlibatan Filantropi ini sangat membantu pemerintah dalam membangun daerah secara sukarela. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Handyaningrat, Soewarno (1994, koordinasi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi Filantropi dengan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau (studi pilar sosial) ini koordinasi yang dilakukan oleh bidang pemerintahan dan pembangunan manusia BAPPEDALITBANG terjadi masalah komunikasi pada alur koordinasi yang belum sesuai dengan pedoman *SDGs* Nasional yang dilaksanakan kepada filantropi sehingga program yang direncanakan dan dikoordinasikan kepada Filantropi menjadi terhambat.

Kata Kunci : Koordinasi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGS*), Kemitraan

**COORDINATION OF PHYLANTROPHY WITH GOVERNMENT AND
HUMAN DEVELOPMENT IN THE REGIONAL DEVELOPMENT
PLANNING AGENCY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE
IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
OF RIAU PROVINCE
(SOCIAL PILLAR STUDY)**

ABSTRACT

WANDI SAPUTRA

To find out the coordination of Philanthropy with the fields of government and human development, regional development planning agencies in implementing sustainable development in Riau Province, the study of social pillars is seen from the very slow development of the SDGs because activities to achieve their goals have not been carried out optimally, so coordination is needed. The province that was the first to commit to implementing the sustainable development goals (TPB). Following the mandate of the presidential regulation number 59 of the year and the governor's regulation no 33 of 2018 regarding sustainable development goals known as SDGs. In its implementation, it involves all stakeholders as stated in the Governor's decision number 1002/VI/2020 regarding the SDGs regional coordination team in Riau Province. Philanthropy involvement is very helpful for the government in developing the region voluntarily. The theoretical concept used in this research is Handayaniingrat, Soewarno (1994, coordination). The method used in this study is a qualitative method using a descriptive approach. Data collected using observation, interview and documentation techniques with triangulation analysis method. The results of this study indicate that Philanthropy Coordination with the government and human development sectors of the regional development planning research and development agency in implementing the sustainable development goals of Riau Province (social pillar study). not in accordance with the National SDGs guidelines which are implemented for philanthropy so that the programs planned and coordinated for Philanthropy are hampered.

Keywords: *Coordination, Sustainable Development Goals (SDGS), Partnership*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang disingkat TPB atau sustainable development goals yang disingkat *SDGs* merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta hukum yang adil. Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di berlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif. Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian millennium development goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Indonesia adalah salah satu negara yang melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pemerintah maupun non-pemerintah saling melakukan koordinasi agar setiap kegiatan yang dilakukan mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, LSM, pelaku usaha, Filantropi, akademisi, media, kelompok masyarakat sangat diperlukan agar adanya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Koordinasi pemerintah dengan non-pemerintah pada pelaksanaan tujuan pembangunan daerah (TPB) sangat penting. Setiap instansi yang berbeda dan keterbatasan data untuk melaksanakan kegiatan yang mengacu pada tujuan

pembangunan berkelanjutan (TPB) akan membutuhkan koordinasi agar tujuan pembangunan (TPB) terlaksana dengan baik oleh pemangku kepentingan.

Provinsi Riau adalah salah satu Provinsi yang pertama kali berkomitmen untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Menjadikan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) sebagai bagian integral dari agenda pembangunan daerah dengan mengikut sertakan seluruh aktor pembangunan untuk bersama-sama mewujudkan tujuannya dalam rangka mengetaskan kemiskinan, menciptakan kondisi ekonomi yang baik dan menjaga kebelangsungan lingkungan. Beberapa tahapan telah dilakukan termasuk penyusunan Rencana Aksi Dearah (RAD) Provinsi Riau sesuai peraturan Gubernur no 33 tahun 2018 yang mengikuti amanat Perpres No 59 Tahun 2017.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaantujuan pembangunan berkelanjutan menetapkan 17 tujuan 169 target yang selaras dengan terget rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah di tanda tangani oleh Presiden RI. Pada Perpres ini terdapat sasaran TPB sebagai lampiran yang dijadikan sebagai pedoman bukan hanya bagi kementerian/lembaga tapi juga seluruh pemangku kepentingan seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), Filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi TPB sesuai denga peran dan tugasnya masing – masing. Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti dengan peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018.

Peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Peraturan menteri ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan TPB di daerah. Dengan adanya peraturan ini setiap daerah yang menerapkan TPB akan sesuai dengan yang diharapkan , baik itu cara koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah dapat dilihat dari komitmen kepala daerah.

Provinsi Riau berkomitmen melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan. pembentukan peraturan Gubernur No 33 tahun 2018 tentang rancangan aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Dalam implementasinya, pemerintah Provinsi Riau melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan sejumlah pemangku kepentingan seperti ormas, Filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 59 Tahun 2017 pada pasal 15 disebutkan untuk pencapaian sasaran TPB di daerah, Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5 tahunan, bersama bupati/walikota di wilayahnya masing – masing dengan melibatkan ormas, Filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama dengan seluruh aktor pembangunan dari berbagai unsur baik pelaku usaha, Filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media dan kelompok masyarakat telah menyusun rencana aksi daerah *SDGs* yang disusun dalam bentuk

narasi dan matrik yang menggambarkan rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai seluruh target TPB pada tahun 2030 mendatang. RAD TPB merupakan pijakan dan panduan bagi semua aktor pembangunan dalam rangka merubah misi menjadi aksi nyata. Dengan adanya dokumen RAD TPB, dapat membuat lebih fokus seluruh upaya bersama semua pihak dan mempercepat pencapaian target TPB di Provinsi Riau.

Dalam melakukan koordinasi upaya yang dilakukan untuk mensinkronkan persepsi dalam melakukan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, Filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media dan kelompok masyarakat dalam proses penyusunan RAD. Berikut adalah proses penyusunan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau.

Tabel I.1 : Proses Penyusunan Recana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Riau

Penyusunan RAD <i>SDGs</i>	Kegiatan	Durasi Waktu	Waktu
Output Pemahaman bersama tentang sistematika laporan RAD <i>SDGs</i> Provinsi Riau dan Matrik RAD (juknis sudah ada)	Diskusi penyamaan persepsi tentang penyusunan RAD termasuk menyepakati sumber data dan dokumen referensi untuk penyusunan RAD Tim ahli dan sekretariat <i>SDGs</i> Provinsi Riau	1 hari	4 desember 2017
Draf awal RAD (narasi sesuai dengan sistematika)	Penyusunan draft awal RAD	2 (dua) Minggu dokumen RPJMD dan Renstra OPD	18 September 2017

laporan dan dalam bentuk matrik RAD)			
Pembahasan dengan pokja	Pertemuan Pokja	3 kali per – pokja / pilar (3 minggu)	09 oktober 2017
Draf narasi RAD	Revisi dokumen oleh tim ahli	1 minggu	16 oktober 2017
Pengisian matrik	Workshop pengisian matrik	1 kali pertemuan	17 oktober 2017
Kesepakatan matrik dengan tim korda (pokja)	Pembahasan matrik Provinsi	1 minggu	1-3 november 2017
Konsultasi publik	Penyampaian draft narasi dan matrik RAD	1 hari	21 desember 2017
Finalisasi narasi	Ulasan terhadap matrik	1 minggu	Januari 2018
Konsinyering matrik	Finalisasi matrik Provinsi dan kabupaten kota	2 minggu	Februari 2018
Konfirmasi data	Konfirmasi data target pada matrik 1 kepada eluruh OPD	2 minggu	Maret 2018
Asistensi matrik	Review dan masukan dari publik	2 bulan	Feb – maret 2018
Review RAD	Review terhadap draft RAD 3 kab pilot dan seluruh matrik kab/kota	2 bulan	Maret - mei 2018
Drafting Pergub	Harmonisasi pergub	2 minggu	April 2018
Launching RAD	Sosialisasi RAD	1 hari	12 juli 2018

Sumber : Dokumen Narasi RAD TPB Provinsi Riau

Dengan adanya RAD TPB akan memberikan dampak percepatan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Percepatan harus dilakukan untuk memberikan hasil pada waktunya, pembiayaan ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan inklusi diperlukan agar setiap orang dapat membuat TPB sukses di Provinsi Riau. Percepatan pencapaian TPB melalui RAD

TPB ini memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah kabupaten dan kota, mengenai tantangan yang dihadapi dan langkah yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai semua sasaran TPB di Provinsi Riau.

Pertemuan atau diskusi seluruh aktor pembangunan dari berbagai unsur baik pelaku usaha, Filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media dan kelompok masyarakat mendapatkan hasil daripada RAD dimuat dalam sebuah dokumen matrik kegiatan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Matrik tersebut berisi Rencana Aksi Daerah(RAD) Pemerintah maupun Non – Pemerintah. Matrik RAD menjadi pedoman agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun non – pemerintah. Matrik RAD tersebut sesuai dengan indikator pelaksanaan TPB Provinsi Riau yang berisi program pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Program yang tertera pada matrik akan di selenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan seperti seperti pelaku usaha, Filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media dan kelompok masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan tersebut ada di dalam keputusan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1002 / VI / 2020 tentang tim koordinasi daerah pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2020-2024.

Keterlibatan pemangku kepentingan tertera pada Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1002 / VI / 2020 tentang tim koordinasi daerah pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2020-2024. Keputusan tersebut sebagai bentuk komitmen Provinsi Riau dalam pelaksanaan TPB, sesuai dengan

peraturan Menteri perencanaan pembangunan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan ini sesuai keputusan tersebut maka dibentuk beberapa tim koordinasi adalah sebagai berikut.

a. Tim Pengarah

Pembentukan tim ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau dan menyampaikan laporan kepada menteri perencanaan pembangunan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional maupun menteri dalam negeri. Ketua pada tim pengarah ini adalah Gubernur Riau.

b. Tim Pelaksana

Pembentukan tim pelaksanaan untuk mengkoordinir penyusunan RAD, tugas-tugas kelompok kerja dan melaporkan hasil kepada tim pengarah. Ketua pada tim pelaksana ini yaitu kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau

c. Tim Kelompok Kerja

Tim kelompok kerja dibentuk untuk membuat RAD, melaksanakan rancangan RAD dan melakukan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan Provinsi Riau serta menyusun laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan bidang tugasnya. Ketua pada tim kelompok kerja ini yaitu kepala bidang badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan

pengembangan yang disebut BAPPEDALITBANG Provinsi Riau, adapun Kelompok kerja (pokja) terdiri atas:

1. Pokja I Pilar Pembangunan Sosial yang bertugas untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pencapaian indikator tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan keetaraan gender.
2. Pokja II Pilar Pembangunan Ekonomi yang bertugas untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pencapaian indikator energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infratraktur, berkurangnya kesenjangan dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
3. Pokja III Pilar Pembangunan Lingkungan yang bertugas untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pencapaian indikator air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan dan ekosistem daratan.
4. Pokja IV Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola yang bertugas untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pencapaian indikator perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Pilar sosial adalah salah satu pilar penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau. Karena menyangkut kualitas kehidupan manusia, dengan adanya tujuan menyelesaikan masalah kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender. Tercapainya tujuan tersebut akan memperoleh

manusia yang berkualitas sehingga akan berdampak pada percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola. Dan dukungan lembaga Filantropi juga membantu dalam pelaksanaan TPB di Provinsi Riau. tentunya dalam mencapai tujuan harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan matrik RAD yang telah disusun dengan baik.

Kegiatan pembangunan pada pilar sosial dilakukan oleh bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau. Bidang pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia ini bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada pembangunan pilar sosial. Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengkoordinasi anggota pada tim kelompok kerja agar kegiatan masing – masing instansi terlaksana sesuai indikator TPB. Peran ketua bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ini sangat penting dalam pelaksanaan TPB yang bekerja sama antara instansi pemerintah maupun non- pemerintah dalam mencapai tujuan. Selain itu dukungan Filantropi juga sangat penting dalam pelaksanaan TPB.

Peran Filantropi sangat penting. Lembaga yang tidak mengharapkan apapun kecuali kemajuan. Filantropi juga bisa disebut lembaga non-pemerintah yang dermawan, karena dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan mempunyai anggaran sendiri tanpa bantuan pihak lain dari segi anggaran. Menjadi lembaga Filantropi pada pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengkonfirmasi kesediaan keanggotaan dari *stakeholders*.

Lembaga Filantropi yang telah melakukan konfirmasi kepada Badan Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau adalah Yayasan Dompot Dhuafa dan Tanoto foundation. Pada pembentukan RAD lembaga Filantropi juga ikut serta, agar setiap kegiatan pemerintah dan Filantropi bisa berkontribusi di bidang tertentu atau selarasnya program tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dengan Filantropi seperti Dompot Dhuafa dan Tanoto Foundation.

Dompot Dhuafa merupakan sebuah lembaga zakat, infak, sedekah yang tergabung sebagai salah satu lembaga Filantropi di Provinsi Riau dan membantu dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Riau. Kegiatan yang dilakukan tentunya sesuai dengan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan seperti program Sentra Ternak Riau yang tujuannya memberdayakan masyarakat miskin dalam pengelolaan hewan ternak. Program berikutnya yang menjadi program unggulan dari Dompot Dhuafa adalah Roemah Jamur Alam Panjang yang bergerak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Program pendidikan dari Dompot Dhuafa yaitu Guru Sekolah Lokal Jauh merupakan kegiatan pendampingan guru-guru di pelosok daerah agar memperoleh kualitas pendidikan yang baik dari guru yang berkualitas. Kemudian pada program kesehatan Dompot Dhuafa mendirikan Rumah Sakit Lancang Kuning yang berbasis zakat dan prioritas pelayanan bagi masyarakat kurang mampu. Serta program dakwah di daerah pedalaman untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman antar sesama.

Selain daripada itu Filantropi yang ada di Provinsi Riau adalah Yayasan Tanoto Foundation. Tanoto Foundation adalah yayasan yang bergerak pada bidang

pendidikan. Program unggulan yang dilaksanakan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Provinsi Riau yaitu program PINTAR (Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran). Program PINTAR ini merupakan upaya meningkatkan pendidikan dasar Provinsi Riau dengan memperbaiki kualitas pembelajaran, kepemimpinan sekolah, serta peran masyarakat.

Selain itu ada program Filantropi yang di susun pada matrik non-pemerintah yaitu :

Tabel I.2. : Tabel Program Filantropi pada Matrik Non-Pemerintah Provinsi Riau

No	Kegiatan	Filantropi	Keterangan
1	Sekolah Pedalaman	Tanoto Foundation	Terlaksana
2	Pelatihan Guru	Tanoto Foundation	Belum Terlaksana
3	Program Pelita Pustaka	Tanoto Foundation	Belum Terlaksana
4	Program Pelita Sekolah Aman	Tanoto Foundation	Terlaksana
5	Program Pelita Sekolah Sehat	Tanoto Foundation	Terlaksana
6	Program Paud	Tanoto Foundation	Belum Terlaksana
7	Program : Program Bantuan Biaya Kesehatan Untuk Pasien	Dompot Dhuafa	Terlaksana
8	Program : Layanan Kesehatan Persalinan Keluarga Miskin	Dompot Dhuafa	Belum Terlaksana
9	Program : Bantuan Alat Bantu Disabilitas	Dompot Dhuafa	Belum Terlaksana
10	Program : LAMUSTA (Layanan Bantuan Mustahik Langsung)	Dompot Dhuafa	Terlaksana
11	Program : Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Dompot Dhuafa	Terlaksana
12	Program : Sekolah Beranda	Dompot Dhuafa	Belum Terlaksana
13	Program : Edukasi Islamic Parenting	Dompot Dhuafa	Terlaksana

Sumber : olahan penulisdan dan ringkasan Matrik RAD Non-Pemerintah Provinsi Riau

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa program dari Filantopi yang terlaksana dan belum terlaksana. Belum terlaksana karena beberapa faktor seperti anggaran

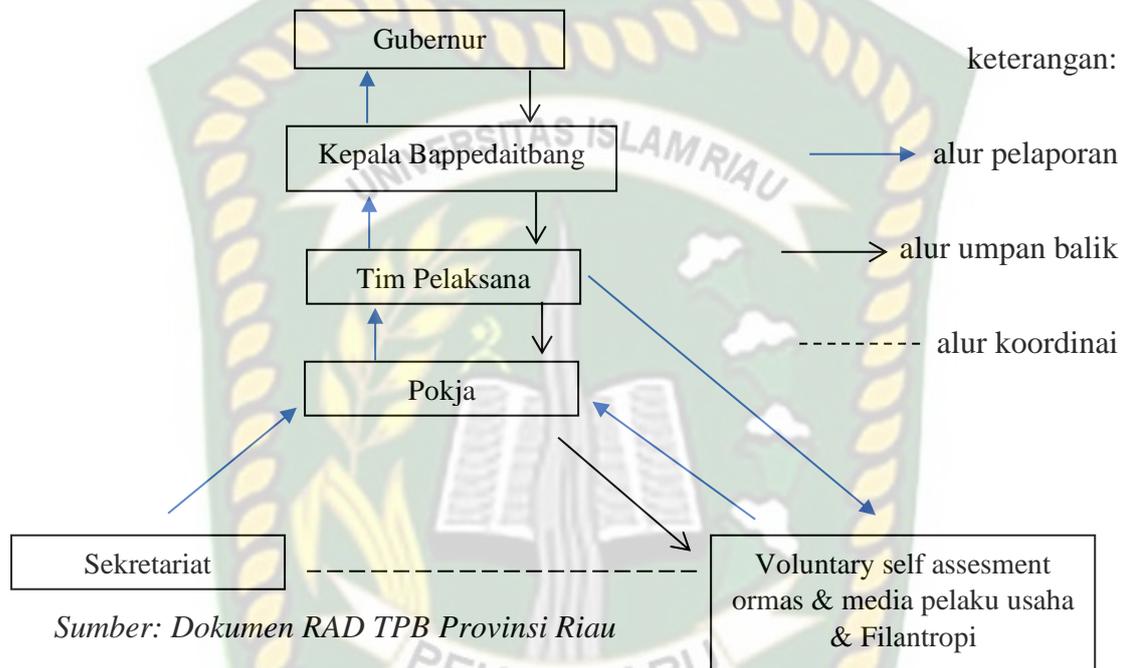
Filantropi dan mereka mempunyai program lain pada institusinya yang harus dilaksanakan serta Filantropi kekurangan data pembangunan yang ada di Riau, agar kegiatannya dapat bermanfaat dan tidak sia-sia. Selain daripada itu Filantropi sebagai kemitraan dalam membangun daerah melaksanakan sebagian program yang telah di susun pada matrik RAD pemerintah Provinsi Riau.

Dengan program yang telah dilaksanakan oleh lembaga Filantropi tersebut dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau. Sesuai dengan arahan kepala daerah dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan ini seluruh pihak harus ikut serta baik itu dari pemerintah maupun non-pemerintah termasuk juga lembaga Filantropi. Dalam pelaksanaannya Gubernur membuat tim pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Koordinasi dilakukan pada saat penyusunan RAD maupun pelaksanaan RAD. Lembaga Filantropi juga ikut serta dan berada pada keanggotaan pada tim kelompok kerja. Koordinasi yang baik akan memperoleh hasil yang baik pula pada tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Provinsi Riau. Koordinasi kelompok kerja pilar sosial Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Riau di delegasikan oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan Provinsi Riau kepada bidangnya yaitu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dilakukan Sekretariat *SDGs* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dengan pimpinan cabang Dhompot Dhufa dan Regional Project Manager. Sekretariat *SDGs* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan bidang

pemerintahan dan pembangunan manusia ini mengkoordinasi tim kelompok kerja pilar sosial. Adapun alur Tim koordinasi adalah sebagai berikut.

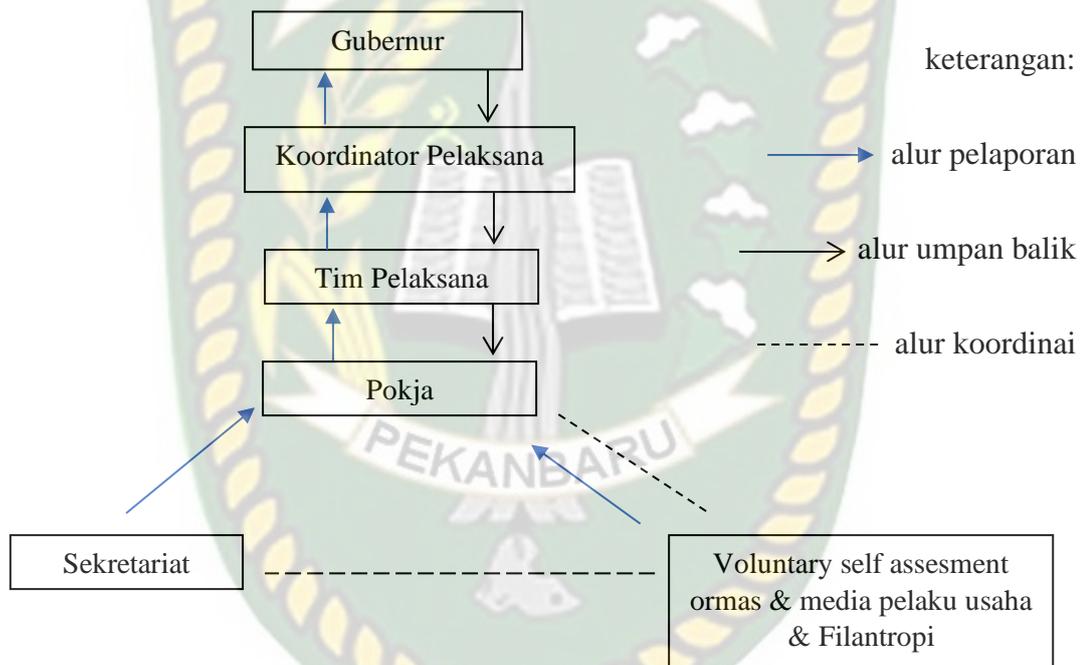
Gambar 1.1 : Alur Pelaporan, Umpan Balik dan Koordinasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh BAPPEDALITBANG Provinsi Riau



Koordinasi dalam pelaksanaan TPB dilakukan oleh Sekretariat *SDGs* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan kepada Filantropi. Filantropi tersebut adalah Dhompot Dhuafa dan Tanoto Foundation. Yang melakukan koordinasi pada Dhompot Dhuafa adalah Pimpinan Cabang Dhompot Dhuafa Riau sedangkan Tanoto Foundation adalah Regional Project Manager. aktivitas Seluruh informasi berkaitan tujuan pembangunan berkelanjutan akan di koordinasikan oleh Sekretariat *SDGs* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan kepada anggota pokja khususnya kepada Filantropi.

Alur koordinasi Provinsi ini berbeda dengan pedoman dari kementerian badan perencanaan pembangunan nasional yang mana kelompok kerja ikut serta juga melakukan koordinasi kepada Filantropi dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun tata cara alur koordinasi dari BAPPENAS adalah sebagai berikut.

Gambar I.2 : Alur Pelaporan, Umpan Balik dan Koordinasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh BAPPEDALITBANG Provinsi Riau



Sumber: Dokumen tata cara pelaporan, koordinasi dan evaluasi BAPPENAS

Semua kelompok kerja pada tim koordinasi menggunakan alur koordinasi seperti yang diatas termasuk kelompok kerja pilar sosial. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia bertanggung jawab pada kelompok kerja pilar sosial menjadi koordinator dari Filantropi. koordinasi tersebut dilakukan dengan cara memberikan surat untuk melakukan pertemuan maupun dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Aktivitas koordinasi yang dilakukan adalah membentuk RAD *SDGs* Provinsi Riau dan melakukan laporan terhadap kegiatan *SDGs*. Pada koordinasi hal yang dikoordinasikan adalah program Filantropi pada matrik RAD Provinsi Riau, hasil kegiatan Filantropi tentang *SDGs*. Dengan itu pemerintah Provinsi Riau Terbantu oleh Filantropi dalam membangun daerah serta Filantropi juga dapat keuntungan bisa langsung membangun daerah dengan data yang dimiliki Provinsi Riau dalam artian tidak sertamerta membuat program membangun daerah tanpa data.

Dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau melakukan koordinasi yang baik pada seluruh pemangku kepentingan. Dari melakukan pertemuan untuk pembentukan RAD yang dilakukan 1 minggu 1 kali pertemuan selama 3 minggu untuk pertemuan kelompok kerja, serta melakukan sosialisasi dan membangun kemitraan dengan non-pemerintah saat pembentukan RAD. Posisi BAPPEDALITBANG dalam pelaksanaan ini menjadi Lembaga koordinator seluruh pemerintah dan non-pemerintah dalam membangun daerah atau pelaksanaan *SDGs*.

Koordinasi yang dilakukan berpedoman pada dokumen RAD tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau. Koordinasi ketua kelompok kerja pilar sosial tidak melaksanakan alur koordinasi baik dapat dilihat dari laporan kinerja Filantropi masih banyak kegiatan yang di matrik RAD tidak terlaksanakan dan tidak memiliki jadwal agenda pertemuan di kelompok kerja. Perbedaan instansi setiap anggota kelompok kerja akan sulit melakukan koordinasi. Alur koordinasi sangat diperlukan agar setiap anggota bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam artian tindakan yang dijalankan teratur. Selain daripada itu informasi hasil

wawancara dengan Sekretariat *SDGs* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menyatakan bahwasanya pertemuan atau rapat hanya dilakukan pada saat pembentukan RAD dan tidak ada pertemuan saat pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut menjadi dampak kurangnya kerja sama tim kelompok kerja pilar sosial pada pelaksanaan kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan. Perbedaan instansi pada setiap anggota dalam kelompok kerja pilar pembangunan sosial menyebabkan kurangnya informasi kegiatan yang dilakukan. Filantropi yang melaksanakan kegiatan hanya berkoordinasi melalui Sekretariat *SDGs* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan kelompok kerja dalam bentuk surat maupun komunikasi sehingga anggota lainnya tidak mendapatkan informasi kegiatan apa saja yang dilakukan dalam kelompok kerja tersebut. Koordinasi yang dilakukan masih terdapat kelemahan. Ketika pihak Filantropi tidak melakukan kegiatan yang tercantum pada RAD, pihak Filantropi tidak dikenakan sanksi apapun mengingat Filantropi bersifat sukarela. Hal tersebut menjadikan kurangnya kurangnya koordinasi oleh ketua kelompok kerja pilar sosial. Seharusnya ada sanksi khusus ketika tidak melakukan kegiatan agar ketua kelompok kerja lebih efektif dalam mengkoordinir Filantropi semaksimal mungkin kegiatan yang ada pada RAD terlaksana, sehingga kesepakan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tujuan pembangunan daerah Provinsi Riau tidak sia – sia.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang koordinasi Filantropi dengan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau, di temukan beberapa fenomena sebagai berikut.

1. Koordinasi yang dilakukan berpedoman pada dokumen RAD tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau yang tidak sinkron dengan pedoman *SDGs* pusat. kelompok kerja pilar sosial belum melaksanakan alur koordinasi sepenuhnya karena Sekretariat *SDGs* BAPPEDALITBANG yang melakukan koordinasi.
2. Berdasarkan wawancara sekretariat *SDGs* BAPPEDALIBANG dan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tim kelompok kerja pilar sosial tidak ada melakukan pertemuan kepada Filantropi setelah pembentukan RAD sementara pertemuan atau rapat sangat penting dalam koordinasi agar membentuk tim dengan kerja sama dengan baik.
3. Kurangnya informasi dan kurangnya pemahaman terhadap alur koordinasi di dalam tim kelompok kerja. Pada saat pelaksanaan kegiatan Filantropi, pihak Filantropi hanya melibatkan Sekretariat *SDGs* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang bukan termasuk ke dalam kelompok kerja. Sehingga anggota kelompok kerja lainnya hanya fokus pada instansinya tanpa memperhatikan kegiatan bersama.
4. Masih dapat kelemahan dalam melakukan koordinasi karena tidak ada sanksi khusus pada Filantropi jika tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang di RAD karena Filantropi masih bersifat suka rela. Sementara RAD dibuat untuk dilaksanakan tetapi belum ada sanksi khusus kepada Filantropi jika tidak melaksanakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“Koordinasi Filantropi dengan Bidang pemerintahan dan Pembangunan**

Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Koordinasi Filantropi dengan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial) ?
2. Apa saja Hambatan Koordinasi Filantropi dengan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
 - a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Filantropi dengan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial).
 - b. untuk mengetahui Hambatan Koordinasi Filantropi dengan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial)

2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Guna teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi publik sehingga ilmu akan berkembang mengikuti zaman untuk penelitian di bidang administrasi khususnya pada bidang tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - b. Guna akademis, yaitu peneliti diharapkan menjadikan penelitian ini sebagai bahan informasi dan dijadikan data sekunder untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian perihal pengembangan ilmu yang sama.
 - c. Guna praktis, yaitu peneliti ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pejabat badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau dan menjadi bahan analisis perkembangan percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa konsep dan ketentuan – ketentuan serta aturan – aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisis data, diantara sebagai berikut.

1. Konsep Administrasi

Stephen P. Robbins (1983) administrasi adalah keeluruhan kegiatan – kegiatan untuk pencapaian tujuan secara efisien melalui kerja sama dengan orang lain.

Leonard B. White (1995:1) administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat di setiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun usaha kecil.

Ordway Tead administrasi adalah segala aktivitas individu – individu dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan tugas memerintah memajukan dan memperlengkapi usaha bersama dari kelompok individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tead, 1951).

Handari Nawawi administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kutipan – kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu proses pengendalian kerja sama sekelompok pemerintah maupun swasta dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Stephen P. Robbins (1990: 4) organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi bekerja atas dasar yang relatif terus – menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Sondang P. Siagian organisasi adalah setiap bentuk perekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan nama terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut bawahan.

Talcott Persons organisasi adalah suatu unit sosial (pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan – tujuan tertentu (Person, 1960).

Pradjudi Atmosudirdjo organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara ekelompok orang – orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama – sama mencapai tujuan tertentu (Atmosudirdjo, 1976).

Harbert A. Simo organisasi adalah pola komunikasi yang lengkap dan hubungan lain – lain di dalam suatu kelompok orang – orang (Simon, 1958).

Dari beberapa pendapat ahli diatas organisasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan beberapa individu yang berkomunikasi untuk bekerja bersama sesuai pembagian tugas masing – masing invidu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Konsep Manajemen

The Liang Gie manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan karyawan – karyawan dan mengarahkan segenapfasilitas kerja agar tujuan usaha kerja sama yang ditentukan benar – benar dapat tercapai.

Adapun fungsi – fungsi manajemen menurut The Liang Gie (Zulkifli & Moris, 2014: 18) adalah sebagai berikut.

- a. Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal – hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara – cara mengerjakannya.
- b. Pembuatan keputusan adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerja sama.
- c. Pengarahan adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.
- d. Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang– rang dan tugas–tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan

keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah timbulnya pertentangan, kekacauan, dan kekosongan tindakan.

- e. Pengontrolan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan – ketentuan ditetapkan.
- f. Penyempurnaan adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

Menurut George R. Terry & Leslie W. Rue (2010: 1) “manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang – orang ke arah tujuan – tujuan organisasional atau maksud – maksud yang nyata.

Menurut George R. Terry dalam Handari Nawawi (2000:36), manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain.

Dari pemaparan tentang manajemen diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan individu dan kelompok dengan bimbingan atau pengarahan saling bekerja sama dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Konsep Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu (1) administrasi dan (2) pembangunan. Telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan – keputusan yang

telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation bulding).

Menurut Sondang P. Siagian dalam buku administrasi pembangunan (2017: 5) administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Definisi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan “upaya nsional” artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan eluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan.

Ditinjau dari administrasi pembangunan, keberadaan suatu negara bangsa adalah demi peningatan kesejahteraan seluruh warganya. Dikatakan demikian karena negara – negara di dunia pada umumnya didirikan sebagai “walfare state” terlepas dari idiologi dan sistem politik yang dianut. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut diperlukan berbagai jenis organisasi, yang tangguh dan handal, baik didalam maupun diluar lingkungan pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan dengan insensitas yang berbeda – beda, yang pasti akan dihadapi di masa datang. Ada beberapa tantangan masa depan yang akan di hadapi dalam pembangunan adalah sebagai berikut.

- a. Masalah pengangguran sungguh merupakan masalah yang sangat rumit ini karena, antara lain jenisnya yang beraneka ragam dan implikasinya yang bersifat multifaset yang berarti pemecahannya pun menuntut pendekatan yang multifungsional dan lintas sektoral.
- b. Tanggung jawab sosial sebagai tantangan, dapat dinatakan secara aksiomatik bahwa tidak ada satu organisasi pun yang mampu tumbuh dan berkembang tanpa dukungan dan kepercayaan dari lingkungannya. Oleh karena itu, demi kepentingan organisasi sendiri, harus terdapat keediaan untuk memikul tanggung jawab sosial tertentu yang dituntut daripadanya. Dua hal yang menonjol dalam kaitan ini adalah jangan sampai organisasi dan para anggotanya bersifat eksekutif dan jangan sampai organisasi menampilkan arogansi institusional dalam menghadapi lingkungannya.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dapat dilihat pada upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern, dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai suatu tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan. Terlihat juga bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah dicapai secara absolut.

Langkah – langkah administrasi pembangunan menurut Sondang P. Siagian adalah sebagai berikut.

- a. Penumbuhan motivasi

- b. Perumusan dan pengambilan keputusan publik
- c. Peletakan dasar hukum
- d. Perumusan rencana pembangunan nasional
- e. Penentuan dan perumusan program kerja
- f. Penentuan berbagai proyek pembangunan
- g. Implementasi rencana dan program kerja
- h. Pentingnya sistem penilaian
- i. Pentingnya mekanisme umpan balik

Dari konsep yang dikemukakan diatas, maka dapat diperoleh administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua aspek kehidupan rangka pencapaian tujuan. Konsep ini sangat membantu peneliti dalam melihat seperti apa pembangunan yang baik karena tujuan pembangunan berkelanjutan masih dalam ruang lingkup administrasi pembangunan.

5. Konsep Koordinasi

Koordinasi (cordination) adalah proses pengintegrasian tujuan – tujuan dan kegiatan – kegiatan pada satuan – aturan yang terpisah (departemen atau bidang – bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu – individu dan departemen – departemen akan kehilangan pegangan ata peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Pengertian Koordinasi Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa: “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Handoko (2003:195) Koordinasi adalah Proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. G.R Terry dalam Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan

Kegiatan – kegiatan dari satuan – satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integrasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam – macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas – tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak sapat diperkirakan, faktor – faktor lingkungan selalu berubah – ubah serta salaing ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi – organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

a. Masalah Koordinasi

Masalah Koordinasi Sekalipun pada umumnya telah disadari pentingnya koordinasi dalam proses administrasi/manajemen pemerintahan, tetapi kenyataannya dalam praktek tidak jarang ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, sehingga pencapaian sasaran/tujuan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Handayani (1989:129) berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut:

1. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural) Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.
2. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdependensi atas fungsi masing-masing.

Adapun hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain:

- a. Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

- b. Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
- c. Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
- d. Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
- e. Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.
- f. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.
- g. Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama

Menurut Handyaningrat (1989:130), untuk mengatasi masalah-masalah dalam koordinasi yang ditimbulkan oleh hal-hal seperti tersebut di atas, berbagai usaha yang perlu dilakukan secara garis besarnya dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk seperti:

1. Mengadakan penegasan dan penjelasan mengenai tugas/ fungsi, wewenang tanggung jawab dari masing-masing pejabat/satuan organisasi yang bersangkutan.

2. Menyelesaikan masalah-masalah yang mengakibatkan koordinasi yang kurang baik, seperti sistem dan prosedur kerja yang berbelitbelit, kurangnya kemampuan pimpinan dalam melaksanakan koordinasi.
3. Mengadakan pertemuan-pertemuan staf sebagai forum untuk tukar menukar informasi, pendapat, pandangan dan untuk menyatukan persepsi bahasa dan tindakan dalam menghadapi masalah-masalah bersama.

Indikator Koordinasi Handyaningrat (1994: 119) koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator:

1. Komunikasi
 - a. Ada tidaknya informasi
 - b. Ada tidaknya alur informasi
 - c. Ada tidaknya teknologi informasi
 - d. Pertemuan
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a. pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b. ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
 - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
 - c. Anggaran
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan

- c. Ada tidaknya sanksi bagi pelnggar kesepakatan
- d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi

5. Kontinuitas Perencanaan

- a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subjek pembangunan
- b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

Pendapat dari Handayani tersebut diatas oleh peneliti selanjutya dijadikan alat ukur untuk mengukur pengaruh koordinasi setelah diuraikan berbagai pendapat diatas.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya koordinasi sangat penting dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Suatu program tujuan pembangunan skala besar, dengan koordinasi dengan pihak – pihak yang tujuan yang sama akan memperoleh hasil yang baik.

6. Konsep Kemitraan

Kemitraan Menurut Sulistiyani (2004, h.129) Kemitraan secara etimologis berasal dari kata partnership yang berasal dari suku kata partner yang berarti kawan, sekutu atau mitra. Secara definisi, maka kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui model-model dalam penerapan kemitraan itu sendiri. Menurut Sulistiyani (2004: 130) model-model kemitraan terbagi atas sebagai berikut:

1. Pseudo partnership (kemitraan semu) Merupakan persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lain. Bahkan ada satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dari semacam kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu mengerti dan memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.
2. Mutualism partnership (kemitraan mutualistik) Merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi atau kelompok atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak- pihak yang melakukan kerjasama dapat diperoleh sehingga sekaligus saling menunjang satu dengan lainnya.
3. Conjugation partnership (kemitraan melalui peleburan atau pengembangan) Merupakan kemitraan yang dianalogikan sebagai paramecium. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka suatu organisasi atau kelompok - kelompok, perorangan yang memiliki

kelemahan di dalam melakukan usaha atau kegiatan dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Menyelaraskan kepentingan pemerintah dan non – pemerintah sangat penting. Praktek pembangunan oleh pemerintah dan non – pemerintah selama ini berjalan pada wilayah dan koridor yang berbeda. Isu pembangunan bisa sama, menyelesaikan masalah kemiskinan misalnya, tetapi pilihan pendekatan dan strategi penyelesaiannya bisa sangat berbeda. Pemerintah sering mengkritisi berbagai kelemahan pendekatan dan strategi pihak – pihak non – pemerintah, demikian pula sebaliknya. Di sisi lain, saat bersamaan, keduanya menyatakan keunggulan dan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan secara kuantitatif, sementara pihak – pihak di luar pemerintah menyakinkan jumlah penduduk miskin secara nyata yang masih saja tinggi. Perbedaan – perbedaan ini menunjukkan tingginya ego masing – masing pihak dalam melihat masalah pembangunan dan kemudian menentukan solusinya. Pencapaian TPB tidak saja membutuhkan komitmen bersama semua pihak, tetapi lebih penting adalah mewujudkan secara nyata penyelarasan kepentingan pemerintah dan non – pemerintah berpedoman pada prinsip kemitraan, inklusif dan *no one left behind*.

Prinsip utama TPB adalah inklusif dan *no one left behind* atau tidak satupun yang tertinggal. Prinsip inklusif ini berarti terbuka setara, yaitu memberi kesempatan kepada semua terlibat secara nyata disetiap pencapaian TPB dan dilakukan secara setara atau tidak ada yang lebih dominan dari yang lain. Dalam Perpres No 59 Tahun 2017 disebutkan bahwa salah satu pihak yang terlibat yaitu Filantropi. Filantropi

adalah pihak yang berbagi dan sumber daya secara sukrela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan,

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kemitraan sangat penting dalam mencapai tujuan dengan bekerja sama satu sama lain demi tujuan yang sama. Saling menguntungkan antara pihak kerja sama akan dapat menghasilkan tujuan yang ingin di capai dengan cepat.

7. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)

Sach (2015) dalam Djonet Santoso konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menyelaraskan antara tujuan-tujuan ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan atau institusi yang baik.

Bahagijo (2016) *SDGs* merupakan rencana pembangunan untuk semua negara sekaligus rencana perubahan sosial berskala besar, yang bukan hanya soal pergeseran konsumsi dan produksi, namun juga perombakan kelembagaan atau pemerintah dalam menyelesaikan masalah.

SDGs merupakan suatu rencana pembangunan dalam skala dunia agar masalah-masalah yang dihadapi saat ini dapat terselesaikan dengan seksama.

Berikut ini adalah landasan *SDGs* menurut Djonet Santoso yaitu:

1. People atau penduduk

Pada penduduk sangat mempunyai permasalahan-permasalahan. Kemiskinan adalah masalah bersama yang juga harus segera diselesaikan. Argumentasi yang dikembangkan adalah bahwa pemenuhan hak asasi manusia dan hak kesetaraan antar penduduk dunia harus menjadi agenda

utama pembangunan. Semua negara bertekad untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya.

2. Planet atau bumi

Semua negara bertekad untuk melindungi bumi dari kerusakan. Tekad ini termasuk mendukung kebutuhan generasi sekarang dan mendatang melalui kesepahaman konsumsi dan produksi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan segera terhadap perubahan iklim.

3. Prosperity atau kemakmuran

Kemakmuran dan kesejahteraan adalah menju masyarakat yang berbahagia. Oleh karena itu, kemakmuran dan kesejahteraan harus menjadi tujuan utama pembangunan. Namun demikian, semua pihak juga harus sepakat bahwa untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan tidak berarti melegalkan kerusakan dengan alam, tidak merusaknya. Dalam prinsip kemakmuran ini, semua negara bertekad untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan yang makmur dan memuaskan dan bahwa kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi terjadi selaras dengan alam.

4. Peace atau perdamaian dan kedamaian harus menjadi landasan untuk bisa mencapai segala cita-cita sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Oleh karena itu semangat yang dikembangkan adalah menumbuhkan masyarakat yang damai, adil dan inklusif.

5. Partnership atau kemitraan, pendekatan inklusif memberikan kesadaran bahwa berbagai perseolan pembangunan hanya bisa diselesaikan dengan melibatkan semua pihak tanpa kecuali untuk bekerja sama. Pelibatan untuk bersama dan bekerja sama ini bukan hanya kontribusi pendanaan, tetapi pada seluruh tahapan pembangunan sejak dari evaluasi kembali. Kemitraan merupakan wujud nyata dari komitmen kesetaraan, tidak eksklusif, tidak bias gender serta saling melengkapi dan menyempurnakan.

SDGs disusun dengan sangat komprehensif dan menunjukkan keinginan yang kuat dari berbagai negara untuk menyelesaikan masalah seara bersama. tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka *SDGs* memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global. Ke-17 (tujuh belas) Tujuan Global (Global Goals) dari *SDGs* tersebut yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan (No Poverty). Tidak ada kemiskinan dalam bentukapapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan (Zero Hunger). Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian

yang berkelanjutan.

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Good Health and Well-Being). Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education). Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender (Gender Quality). Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation). Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy). Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (Decent Work and Economic Growth). Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure). Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan (Reduced Inequalities). Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negaranegara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (Sustainable Cities and Communities). Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production). Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim (Climate Action). Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut (Life Below Water). Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat (*Life On Land*). Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (Peace, Justice and Strong Institutions). Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh

kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships For The Goals).

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas konsep tujuan pembangunan berkelanjutan ini menjadi indikator yang sangat penting dalam merencanakan program yang bermanfaat. Konsep ini dijadikan pedoman analisis peneliti dalam melakukan penelitian koordinasi Filantropi dengan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau (studi pilar sosial).

8. Filantropi

Filantropi menurut W.K Kellog Foundation mendefinisikan Filantropi secara lebih luas, yaitu memberikan waktu, uang, dan pengetahuan bagaimana cara mengembangkan kebaikan bersama. Pengertian tersebut secara tegas mengemukakan bahwa memberi tidak semata-mata hanya dimaknai aspek materianya, tapi juga aspek lain yang lebih luas, yaitu meluangkan waktu dan menyumbangkan pengetahuan untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Istilah memberi (to give) atau berbagi (to share) juga dapat diartikulasikan dalam bentuk kesadaran, dukungan, komitmen, dedikasi, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat

dalam mengangkat persoalan kemiskinan serta memberikan solusi terhadap problem sosial yang ada di sekitar mereka.

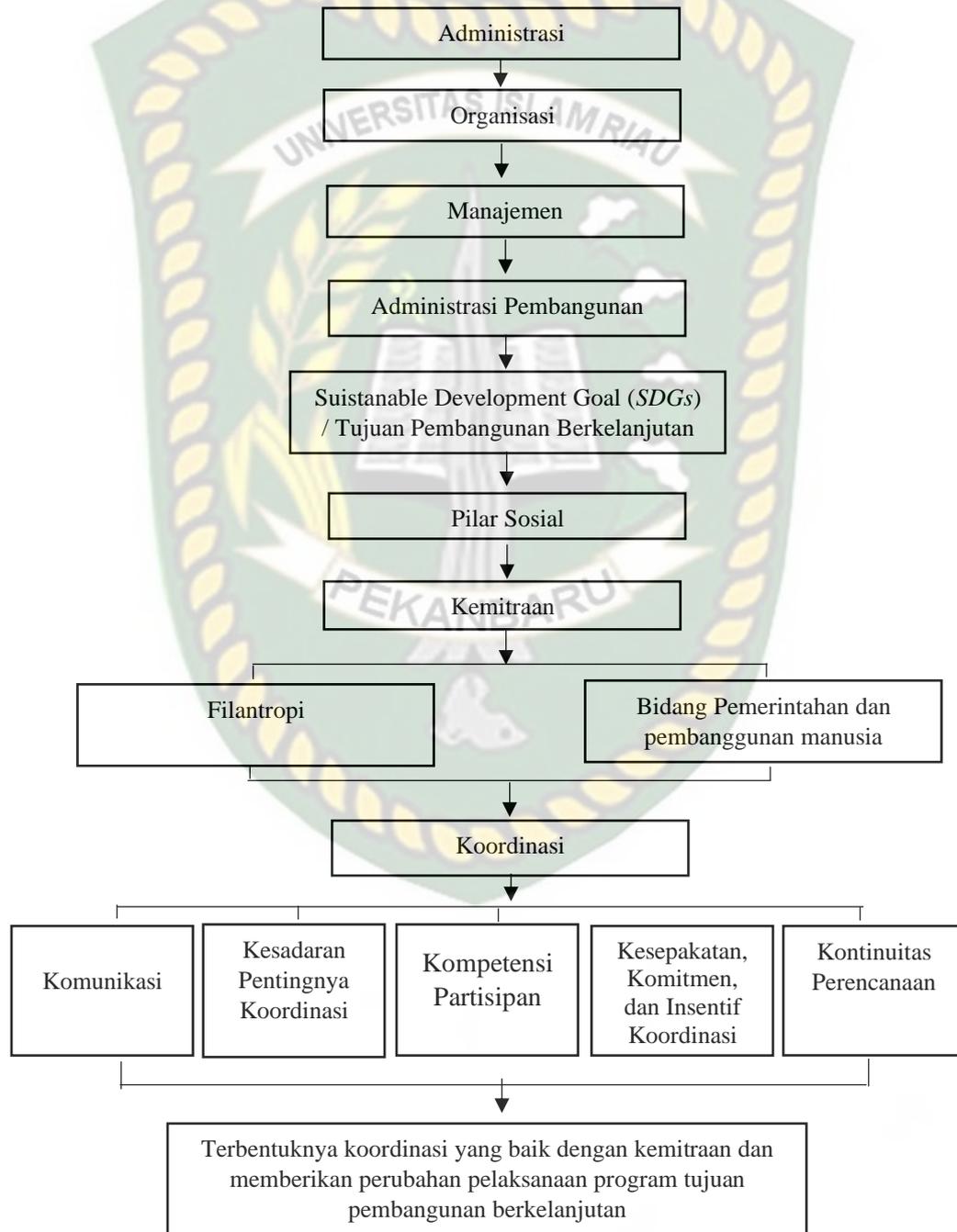
Menurut Arif Maftuhin Filantropi sebagai kegiatan yang bersifat universal, meskipun dengan nama yang berbeda-beda. Orang di berbagai belahan dunia menyisihkan uang, harta, atau waktu yang mereka miliki untuk menolong orang lain. Kegiatan Filantropi terjadi lintas negara dan hampir tidak terkait dengan tingkat kemakmuran negara atau kekayaan seseorang. Filantropi merupakan hasil dari proses panjang umat manusia dalam mengembangkan misi kemanusiaan.

Hilman mengemukakan istilah Filantropi dimaknai kedermawanan, sebuah watak atau sikap altruistik (mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama) yang sudah menyatu dalam diri manusia, baik individual maupun kolektif. Nilai sosial dan budaya dalam masyarakat yang menginspirasi dan memotivasi praktik kedermawanan boleh jadi berbeda-beda, meskipun ujungnya bermuara pada praktik yang sama memberi.

Mencermati uraian diatas, Filantropi adalah pihak yang berbagi dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan. Filantropi yang identik dengan berderma, mengajak setiap orang untuk menjadi seorang dermawan. Berderma bukan hanya dengan menggunakan materi, dapat pula menggunakan kemampuan yang dimiliki atau non materi.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial)



Sumber : Olahan Penulis Tahun 2021

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep maupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut.

1. Organisasi adalah suatu kumpulan beberapa individu yang berkomunikasi untuk bekerja bersama sesuai pembagian tugas masing – masing individu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi yang dimaksud adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. Manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan individu dan kelompok dengan bimbingan atau pengarahan saling bekerja sama dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua aspek kehidupan rangka pencapaian tujuan.
4. *SDGs* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah program kegiatan membangun daerah, membangun skala nasional maupun secara global. Dengan adanya program *SDGs* ini pemerintah dapat melaksanakan tujuan kehidupan dunia yang lebih baik. Pada pelaksanaannya ada 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

5. Kemitraan adalah mencapai tujuan dengan bekerja sama satu sama lain demi tujuan yang sama. Saling menguntungkan antara pihak kerja sama akan dapat menghasilkan tujuan yang ingin di capai dengan cepat.
6. Pilar sosial adalah pembahasan tentang tujuan menyelesaikan masalah kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender.
7. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah bidang dari organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau.
8. Filntropi Filantropi adalah pihak yang berbagi dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
9. Koordinasi koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Pada penelitian ini bagian Sekretariat *SDGs* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia BAPPEDALITBANG Provinsi Riau dengan pimpinan cabang Dhompot Dhuafa dan Regional Project Manager Tanoto Foundation.
10. Komunikasi merupakan media antar individu untuk saling memberikan informasi yang disampaikan secara lisan maupun melalui media lainnya. Komunikasi adalah hal terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan

termasuk koordinasi. Komunikasi ini dapat dilihat dengan ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi, dan ada tidaknya teknologi informasi serta ada tidaknya pertemuan atau rapat dalam kelompok kerja.

11. Informasi adalah sekumpulan data kebijakan atau keputusan yang diproses dan dikelola, dikirim dan diterima oleh individu atau kelompok.
12. Alur koordinasi adalah proses melakukan koordinasi agar kegiatan-kegiatan dapat di arahkan sesuai rencana dalam mencapai tujuan. Alur koordinasi ini sangat dipelurkan dalam mencapai tujuan organisasi.
13. Teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi agar informasi dapat diakses oleh kemitraan.
14. Pertemuan merupakan proses berkumpulnya minimal dua orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan yang dilakukan organisasi pemerintah maupun non – pemerintah.
15. Kesadaran pentingnya koordinasi adalah setiap masing-masing pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran akan pentingnya koordinasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan ketaatan terhadap hasil koordinasi. Setiap kegiatan walaupun dilakukan oleh masing-masing instansi tetapi diperlukan keselarasan kegiatan yang dilakukan. Setiap kegiatan yang bekerjasama langsung dengan instansi lain harus dikerjakan secara maksimal dan butuh bantuan dari instansi lain.

16. Pengetahuan adalah pemahaman Tim koordinasi dalam melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Baik itu pemahaman alur koordinasi, matrik RAD dan kegiatan yang ada dikelompok kerja pilar sosial.
17. Ketaatan terhadap koordinasi adalah patuh dalam melaksanakan sesuai dengan arahan dan keputusan pemimpin.
18. Kompetensi Partisipan, Dalam indikator ini, melihat bagaimana Peserta koordinasi yang berkompeten mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bagaimana masing-masing stakeholders membuat program atau kegiatan baik yang dilakukan secara independen maupun berkoordinasi dengan instansi lain dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Pejabat yang berwenang terlibat yaitu Ketua BAPPEDALITBANG dan ketua bidangnya serta pimpinan pada Filantropi yang ada di Provinsi Riau.
20. Ahli pembangunan yang terlibat adalah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan pada bidang pembangunan.
21. Anggaran partisipan adalah sumber daya untuk mencapai tujuan dalam rangka menjalankan organisasi dan merealisasikan kegiatan-kegiatan.
22. Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dapat diukur berdasarkan bentuk kesepakatan, sanksi bagi pelanggar kesepakatan dan insentif yang dikeluarkan bagi pelaksana koordinasi. Bagaimana Kesepakatan dan komitmen yang harus diagendakan (diprogramkan)
23. Bentuk kesepakatan yaitu kumpulan keputusan pada organisasi.

24. Pelaksana kegiatan yaitu kumpulan Individu dan kelompok yang beraktivitas mencapai tujuan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan.
25. Sanksi bagi pelanggar kesepakatan adalah hukuman ketika pelaksana kegiatan tidak melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
26. Intensif bagi pelaksana koordinasi adalah imbalan atau pengharhargaan.
27. Kontinuitas perencanaan merupakan keberlanjutan dari keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
28. Umpan balik adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau oleh Pemerintah dan non – Pemerintah.
29. Perubahan terhadap hasil kesepakatan adalah membuat keputusan kembali untuk tercapainya tujuan.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial).

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut Handayani, Soewarno koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja organisasi,	Koordinasi	Komunikasi	a. Informasi b. Alur koordinasi c. Teknologi informasi d. Pertemuan
		Kesadaran Pentingnya Koordinasi	a. pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi

<p>sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuan. (Handyaningrat, 1994:130)</p>			b. ketaatan terhadap hasil koordinasi
	Kompetensi Partisipan		<p>a. Pejabat yang berwenang terlibat</p> <p>b. ahli di bidang pembangunan yang terlibat</p> <p>c. Anggaran partisipan</p>
	Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi		<p>a. Bentuk kesepakatan</p> <p>b. Pelaksana kegiatan</p> <p>c. Sanksi bagi pelanggar kesepakatan</p> <p>d. Insentif bagi pelaksana koordinasi</p>
	Kontinuitas Perencanaan		<p>a. Umpan balik dari obyek dan subjek pembangunan</p> <p>b. Perubahan terhadap hasil kesepakatan</p>

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif, dengan analisa deskriptif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan filantropi dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar pembangunan sosial. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informai yang detail terhadap objek penelitian , sehingga akan ditemukan gambaran yang sangat jela dari hasil analisa.

Tipe kualitatif digunakan karena dapat menghasilkan data dengan akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara tersusun, fakta dan akurat sehingga mengenai fakta – fakta, sifat–sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitanya belum lama (Sugiyono, 2014:7).

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Adapun lokasi objek penelitian adalah di Provinsi Riau. Alasan penulis melakukan penelitian ini disebabkan karena peneliti ingin melihat koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau dengan Filantropi yang ada di Riau dalam

pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Riau dan Provinsi Riau sebagai Provinsi pertama yang berkomitmen menindaklanjuti peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.

C. *Key informan dan Informan Penelitian*

Informan adalah orang yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Henderson dalam Suyatno (2005: 171-172) *informan* ini dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *informan* kunci (*key informan*) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan peneliti.

Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Sehubungan dengan tentang koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau. Maka dalam penelitian ini menggunakan *key informan* dan *informan*, yaitu:

1. Kepala subbidang pendidikan, budaya dan pemuda yang merupakan sekretaris *SDGs* Provinsi Riau dan perwakilan ketua bidang pemerintahan dan pembangunan manusia BAPPEDALITBANG Provinsi Riau sebagai *key informan*.
2. Sekretariat *SDGs* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau sebagai *informan*.

3. Regional Project Manager Yayasan Tanoto Foundation (lembaga Filantropi) sebagai *informan*.
4. Pimpinan cabang Yayasan Dompot Dhuafa (lembaga Filantropi) sebagai *informan*.

D. Teknik Penempatan *Informan*

Teknik penempatan *informan* menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sample yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Pertama-tama dipilih satu orang atau beberapa orang, tetapi karena dengan orang tersebut peneliti belum merasa lengkap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan orang sebelumnya.

E. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena ini dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya akan terinterpretasikan dan analisis. Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap erta berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara

lain data hasil wawancara penelitian tentang koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia badan perencanaan pembangunan daerah dengan Filantropi dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar pembangunan sosial, *informan* berasal dari Kepala badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau, Ketua kelompok kerja pilar pembangunan sosial, Regional Project Manager Yayasan Tanoto Foundation, Pimpinan cabang Yayasan Dompot Dhuafa, Sekretariat SDGsBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu beraal dari badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau. Data sekunder ini diperoleh berupa dokumen resmi yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat berbentuk buku – buku ilmiah, dokumen administrasi atau bahan lain yang sudah merupakan data pendukung dalam penelitian. Data sekunder memperkuat informasi dan dilengkapi dengan cara mencari informasi dalam bentuk dokumentasi, file dan lainnya.

- a) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB),
- b) Peraturan Gubernur No 33 tahun 2018 tentang rancangan aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB),

- c) Dokumen Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1002 / VI / 2020 tentang tim koordinasi daerah pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2020-2024,
- d) Matrik RAD Pemerintah dan Non – Pemerintah
- e) Dokumen Narasi RAD TPB Provinsi Riau

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lebih dari suatu teknik pengumpulan data, dengan maksud agar data yang didapatkan jauh lebih lengkap dan akurat. Menurut Sugiyono (2012:241) teknik pengumpulan data adalah sebagai teknik pengumpulan data dan sumber daya yang ada. Adapun teknik – teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui informasi yang terkait dan berhubungan erat dengan penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung permasalahan yang ada di lokasi penelitian terkait koordinasi Filantropi dengan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia badan perencanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (studi pilar pembangunan sosial) Provinsi Riau.
- 2) Wawancara (interview) penulis melakukan wawancara langsung dengan pengumpulan data dengan mengadakan serangkaian tanya jawab langsung kepada responden yang menjadi objek penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur yaitu

pelaksanaan wawancara lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka dimana responden diminta pendapat dan ide – idenya yang ditujukan kepada *informan* penelitian terpilih yaitu Kepala badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau, Ketua kelompok kerja pilar pembangunan sosial , Kepala cabang Yayasan Tanoto Foundation, Kepala cabang Yayasan Dompot Dhuafa, Sekretariat SDGsBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.Wawancara yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan - pertanyaan tertulis beserta jawaban pilihan yang telah dipersiapkan. Sehingga peneliti dapat membandingkan informasi atau data dari setiap *informan*.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis – garis besar permasalahan sehingga peneliti dapat menggali informasi atau data lebih mendalam.

c. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap antara pewawancara dengan *informan* atau orang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara, pewawancara dan *informan* terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

- 3) Dokumentasi yaitu penulis mencari dan mengumpulkan data yang relevan berhubungan dengan penelitian yaitu berupa dokumen – dokumen yang tertulis, gambar elektronik yang bertujuan untuk melengkapi data primer. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada diluar tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berbentuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), Peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, peraturan Gubernur No 33 tahun 2018 tentang rancangan aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), dokumen Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1002 / VI / 2020 tentang tim

koordinasi daerah pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2020-2024.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan fakta – fakta lapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi uraian – uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

Usaha mendeskripsikan fakta – fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala – gejala secara lengkap dalam aspek yang diamati dan diselidiki agar jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan fenomena dan gejala – gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan penjabarannya, akan tetapi termasuk juga usaha menemukan hubungan satu dengan yang lainnya didalam aspek yang diteliti.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2013: 248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pada proses analisis data dalam memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan yang

memanfaatkan sesuatu lain, di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. (Moleong, 2013:330).

Menurut Arifin (1996:132) triangulasi ada 2, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yang dilakukan adalah dengan cara *cross check* data dengan fakta dari sumber lainnya dan menggunakan kelompok-kelompok *informan* yang berbeda.

2. Triangulasi metode

Triangulasi ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Pada penelitian ini metode yang digunakan selain wawancara mendalam juga digunakan metode observasi. Menurut Lincoln & Guba (1985) dalam Arifin (1996:69), wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan.

Peneliti juga menggunakan analisis data di lapangan model miles and huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datannya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu data reduction, data display, dan

conclusion drawing/verification. Langkah – langkah analisis dapat ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar III.1 : Komponen dalam Analisis Data



Sumber : Sugiyono (2016: 246)

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek – aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang di pandang

asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori yang digunakan dalam penelitian.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai dari penyusunan Skripsi hingga pengandaan skripsi, yaitu dari minggu pertama bulan Juli Tahun 2021 hingga bulan Desember Tahun 2021, lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel III.1: Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020/2021																											
		Bulan dan Minggu Ke-																											
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP																												
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
5	Survey Lapangan																												
6	Analisis Data																												

Berisi Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Jenis Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal dan Waktu Kegiatan.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Berisi Pembahasan Tentang Penggambaran Umum Tentang Situasi Dan Kondisi Mengenai Lokasi Penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi Permasalahan Yang Akan Ditulis Oleh Peneliti Mengenai Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial)

BAB VI PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran Dari Hasil Penelitian.

BAB IV

Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Provinsi Riau adalah salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki luas wilayah 87.023 km² dengan jumlah penduduk 6.814.909. Provinsi Riau memiliki 10 kabupaten, 2 kota, 166 kecamatan dan 1.847 kelurahan.

Visi Pembangunan Provinsi Riau adalah sebagaimana diamanahkan Peraturan daerah (perda) Provinsi riau no 12 tahun 2017 tentang perubahan peraturan daerah Provinsi riau no 9 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi riau 2005-2025 adalah: “terwujudnya Provinsi riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera ahir dan batin, di Asia tenggara tahun 2025”.

Selanjutnya, visi jangka panjang tersebut diuraikan kedalam 12 misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Provinsi riau sebagai pusat kegiatan perekonomian;
- b. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah
- d. Mewujudkan kerjasama pembangunan antarwilayah
- e. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pemerintah daerah
- f. Mewujudkan dukungan istem informasi pembangunan yang hadal
- g. Mewujudkan masyarakat riau yang mandiri dan sejahtera

- h. Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai payung kebudayaan
- i. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak
- j. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat
- k. Mewujudkan lingkungan yang lestari
- l. Mewujudkan masyarakat mandiri

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD). Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2024 yang merupakan penggabungan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Riau saat ini merupakan tahap RPJPD yang berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian visi RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024:

“terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”

Adapun misi yang dijalankan untuk mencapai visi jangka menengah tersebut adalah;

- a. Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya,
- b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan
- c. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing

- d. Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing
- e. Mewujudkan tat kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

B. Gambaran Umum Dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau maka perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang dapat membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Organisasi perangkat daerah merupakan satuan kerja yang dibentuk dengan tujuan agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan daerah atau keputusan pemerintah daerah.

Badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan Provinsi Riau adalah salah satu diantara satuan kerja perangkat daerah yang ada pada pemerintah Provinsi Riau. Satuan kerja ini dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 92 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan Provinsi Riau.

Visi misi badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan adalah “MEWUJUDKAN RENCANA PEMBANGUNAN Provinsi Riau yang berkualitas melalui lembaga perencana yang profesional dan berintegritas”. Penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

1. Berkualitas adalah tersusunnya rencana pembangunan yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan kebutuhan lokal atau akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, mendukung tercapainya tujuan pembangunan.
2. Professional menggambarkan kinerja yang berorientasi pada hasil dan dengan menjaga kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi perencanaan yang modern.
3. Integritas menunjukkan sebuah sikap yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar dan teguh sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

Untuk menjawab visi tersebut di atas, dan berdasarkan perumusan misi, dapat dituangkan 3 misi sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana serta kualitas kelembagaan menuju lembaga perencana yang profesional.
3. Peningkatan pengelolaan data perencanaan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

a. Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Riau

Pejabat dan uraian tugas pokok & fungsi Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2019

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau

2. Tugas Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

3. Fungsi Kepala Badan

1. Penyusunan Kebijakan Teknis
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah Daerah,
4. dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG Provinsi Riau, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi, Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Subbidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pembangunan jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, catatan sipil, social, dan pemberdayaan masyarakat dan desa serta kebencanaan;
- d. Melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, catatan sipil, sosial, dan pemberdayaan masyarakat dan desa serta kebencanaan;
- e. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, catatan sipil, sosial, dan pemberdayaan masyarakat dan desa serta kebencanaan;;
- f. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, catatan sipil, sosial, dan pemberdayaan masyarakat dan desa serta kebencanaan;;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat,

administrasi kependudukan, catatan sipil, sosial, dan pemberdayaan masyarakat dan desa serta kebencanaan;;

- h. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, catatan sipil, sosial, dan pemberdayaan masyarakat dan desa serta kebencanaan;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Subbidang Pendidikan, Budaya dan Pemuda mempunyai tugas:

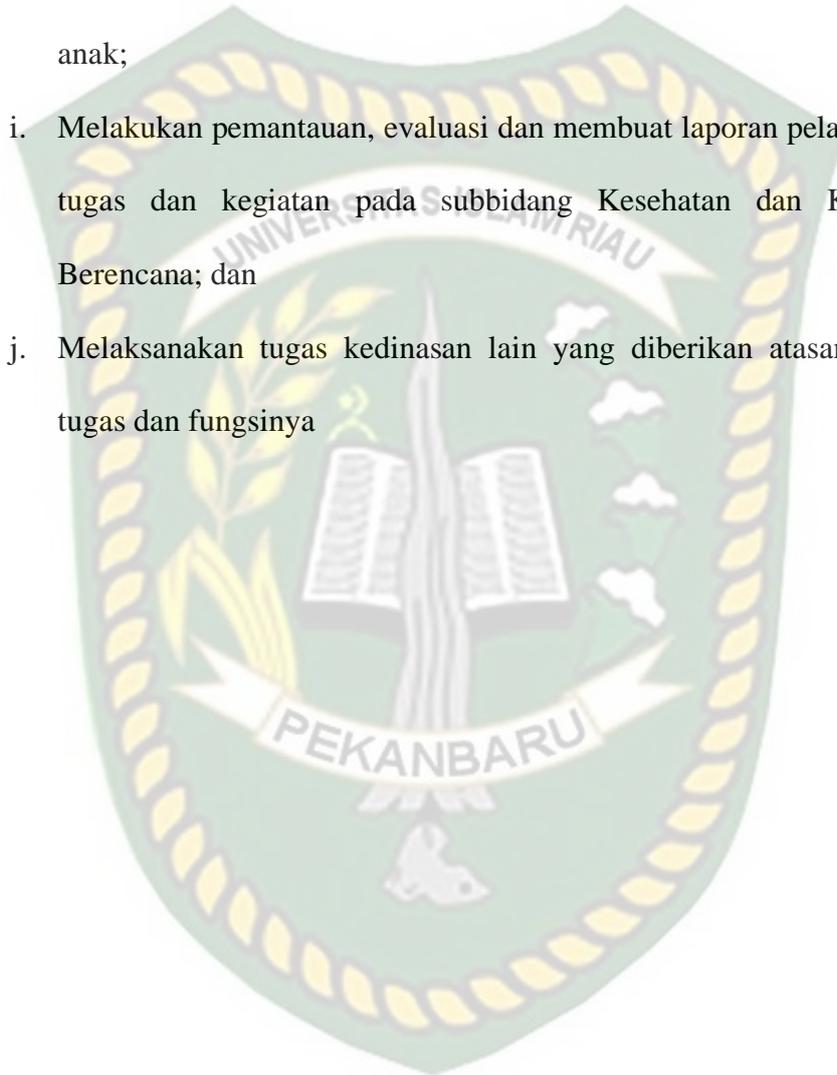
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang Pendidikan, Budaya dan Pemuda;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang Pendidikan, Budaya dan Pemuda;
- c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pembangunan jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;

- d. Melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan
- h. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Pendidikan, Budaya dan Pemuda; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

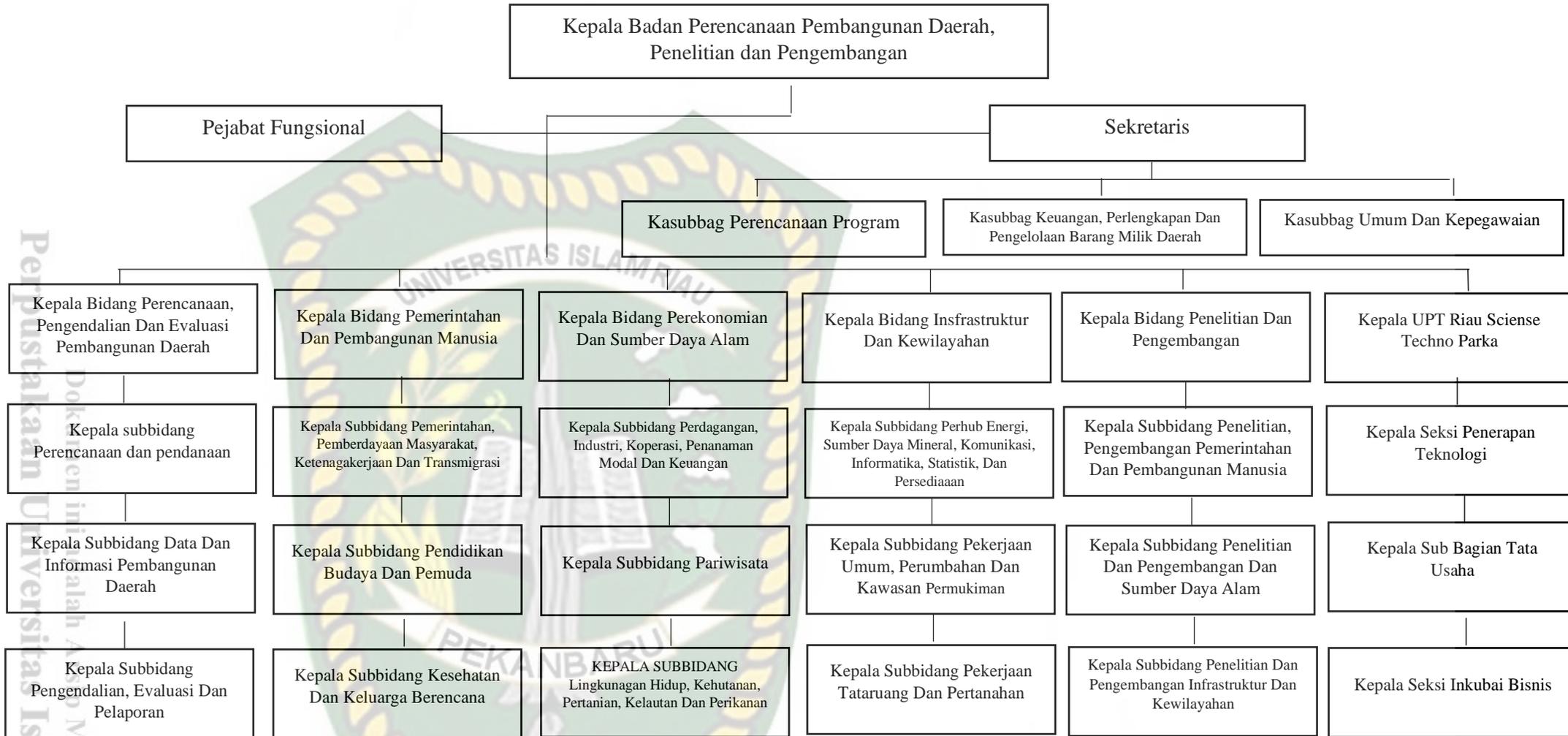
7. Kepala Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pembangunan jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Melaksanakan analisis terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- h. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya



Gambar IV. 1: Struktur Organisasi BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau



C. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa cabang Riau merupakan sebuah lembaga zakat, infak, sedakah yang berlokasi di Pekanbaru, jalan Tuanku Tambusai. Dompot Dhuafa ini cabang resmi dari pusat. Pada awal tahun 2013, tepatnya 20 februari dibukalah Dompot Dhuafa hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemko Pekanbaru yang diwakili Plt.Sekdako, Yuzamri dengan Presiden Direktur Dompot Dhuafa, Ismail A.Said di damping Branch Manager Dompot Dhuafa Riau, Yuan Fatkhu Rizki.41 Berdirinya Dompot Dhuafa sebagai lembaga zakat yang resmi berupaya untuk menghimpun zakat yang ada di Riau karna Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi zakat yang besar di Indonesia. Dan kehadiran Dompot Dhuafa dapat membantu lembaga zakat yang lain untuk menghimpun dana zakat yang ada.

Implementasi Aksi dengan Landasan Prinsip “bergerak ke sana – sini dalam organisasi”

1. Perkaya project-project baru yang terjadwal dan termonitor
2. Setiap project akan dilead oleh pemimpin tim, dan secara personal setiap insan DD Riau harus memiliki project pribadi yang dalam implementasi project ada aktiitas pelibatan antar individu
3. Insan seluruh tim akan di dorong untuk memperbanyak kalaborasi internal dan eksternal utamanya dengan pihak eksternal.

Adapun visi yang di miliki oleh Dompot Dhuafa Riau adalah terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan⁴⁴ . Sedangkan Misi Dompot Dhuafa Riau di antaranya :

1. Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian
2. Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan
3. Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global
4. Menumbuhkembangkan dan mendayagunaan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan
5. Mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan

Kemudian memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong voluntarism dan tumbuhnya kepemimpinan masyarakat sebagai agent of change
2. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder untuk terciptanya kesejahteraan
3. Menjadi lembaga penggalangan sumber daya masyarakat yang terpercaya
4. Mengoptimalkan penggalangan sumber daya masyarakat
5. Menjadi World Class Organization berbasis ZISWAF

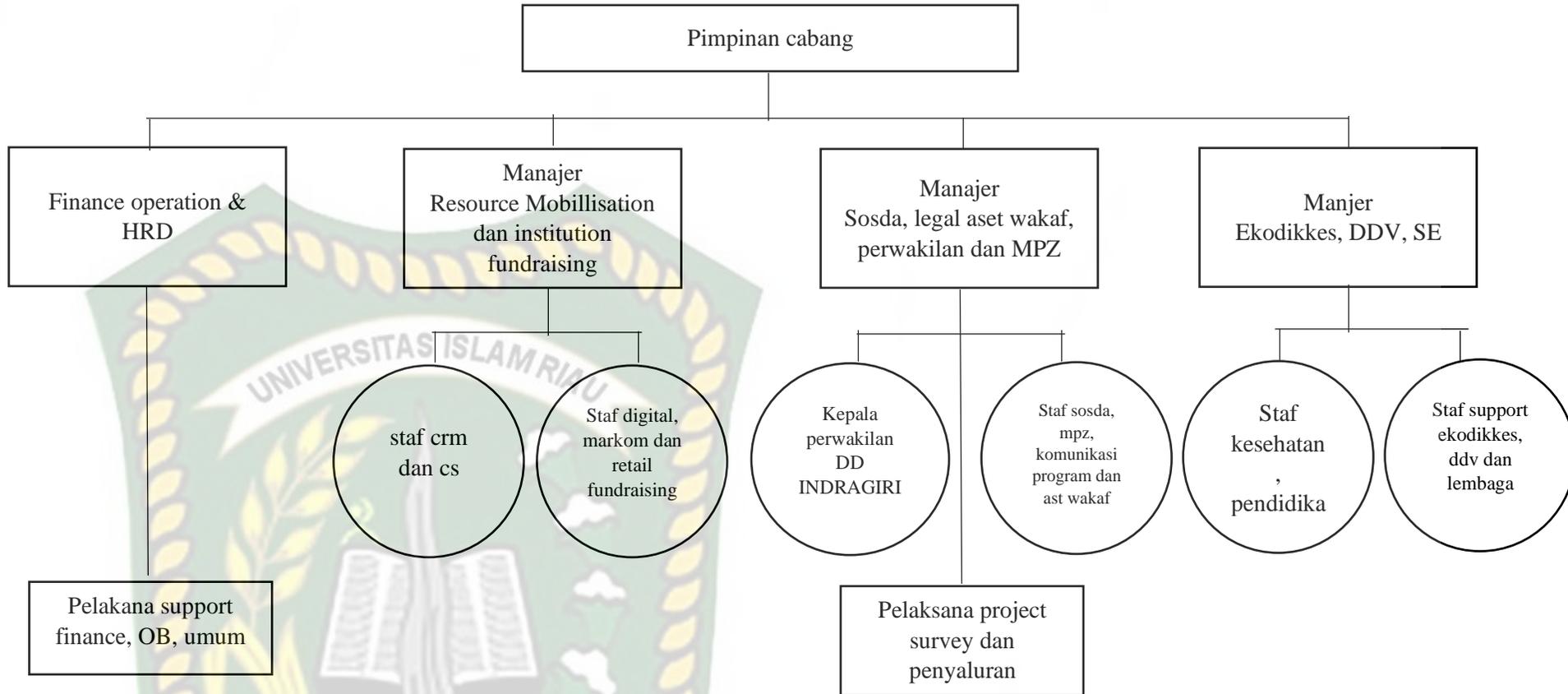
6. Terbentuknya jaringan klaster mandiri untuk mengentaskan kemiskinan
7. Menjadi lembaga expert dan rujukan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia
8. Mengembangkan industri dan usaha yang berbasis redistribusi aset serta mewujudkan jaringan bisnis yang sehat dan etik.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV. 2 : Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Provinsi Riau



D. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Tanoto Foundation

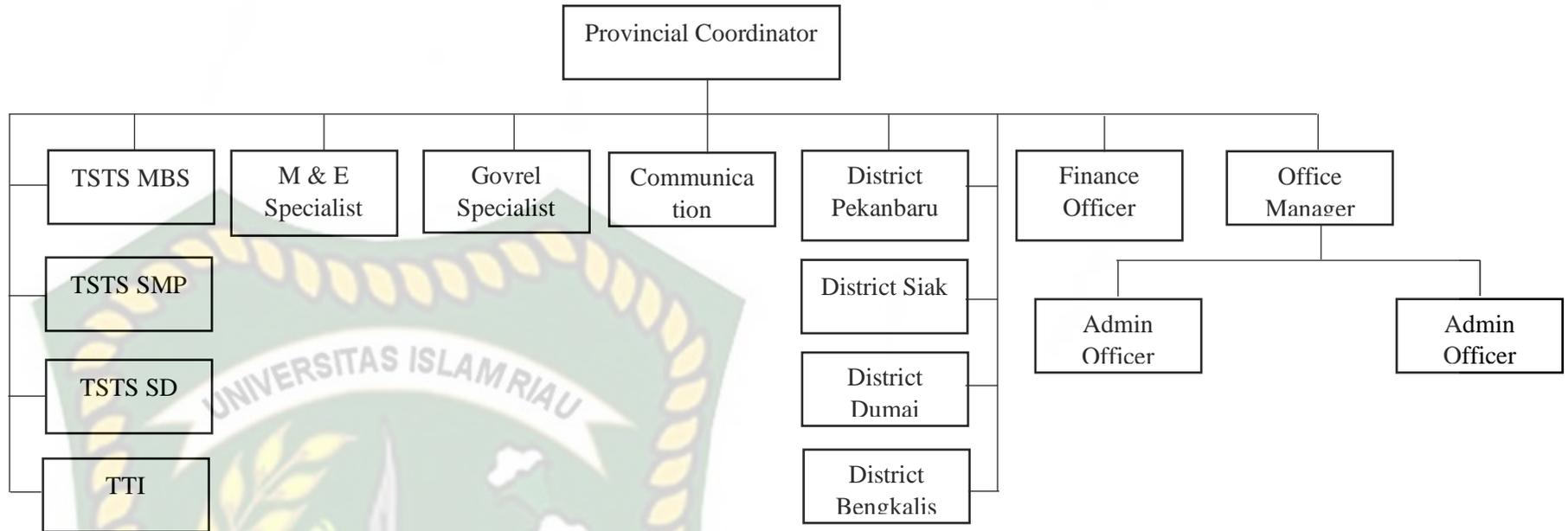
Tanoto Foundation adalah sebuah organisasi Filantropi independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto atas dasar keyakinan bahwa setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk mewujudkan potensinya secara penuh. Tanoto Foundation memulai kegiatannya pada 1981, saat pendiri kami membangun Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Besitang, Sumatera Utara.

Tanoto Foundation menjalankan program berdasarkan keyakinan bahwa pendidikan berkualitas bisa mempercepat terciptanya kesetaraan peluang. Kami memanfaatkan kekuatan transformatif pendidikan untuk membantu masyarakat agar bisa mewujudkan potensi dan memperbaiki taraf hidupnya.

Tanoto foundation, organiasi Filantropi yang selalu menggunakan dana sendiri untuk membiayai program-programnya dalam mendukung pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di riau. Tidak ada hibah dana dari pemerintah ke tanoto foundation. Tanoto juga ikut serta dalam tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah indonesia.

Filosofi dan misi tanoto foundation adalah pendidikan berkualitas meningkatkan kesetaraan peluang dan kami mengembangkan potensi taraf hidup melalui pendidikan berkuaitas yang transformatif

Gambar IV. 3 : Struktur Organisasi Tanoto Foundation Provinsi Riau



BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas *Key informan* dan *Informan*

Penelitian ini melibatkan beberapa *informan* yang dianggap mengerti dan memahami akan keadaan maupun permasalahan yang peneliti teliti dan memberikan interpretasi terhadap objektivitas dalam penelitian “Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintah Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial)”. Pada identitas dalam penelitian ini dapat dideskripsikan menjadi 3 bagian klasifikasi yakni nama, jenis kelamin dan pekerjaan. klasifikasi *informan* yang diharapkan mampu memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan mampu mendukung data dari penelitian ini dikarenakan faktor-faktor pekerjaan sangatlah juga mempengaruhi jawaban dan keterangan yang diberikan. Adapun *key informan* didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 : Identitas *Key Informan*

NO	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	M. Iksan, S.IP	Laki-laki	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretaris Sekretariat <i>SDGs</i> Provinsi Riau

Sumber : Modifikasi Peneliti dari hasil wawancara 2021

Tabel V.2 : Identitas Informan

NO	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc	Perempuan	Wakil Ketua Sekretariat SDGsBAPPEDALITBANG Provinsi Riau
2.	Dendi Satria Buana	Laki-laki	Manager Project Tanoto Foundation
3.	Ali Bastoni	Laki-laki	Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Povinsi Riau

Sumber : Modifikasi Peneliti dari hasil wawancara 2021

B. Pembahasan Penelitian Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintah Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial)

Dalam pembahasan pada bab ini, dijelaskan hasil penelitian tentang Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintah Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial). Peneliti mendapatkan data berupa hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber *key informan* perwakilan kepala bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan Provinsi Riau, kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau, dan Regional Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau.

Wawancara juga berfokus pada proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan narasumber yang sangat mendukung penelitian terhadap permasalahan yang dijumpai yakni berfokus pada Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintah Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial).

Adapun pertanyaan-pertanyaan meliputi indikator yang sesuai dengan Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintah Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial). Yaitu berupa variabel penelitian yang menjadi landasan dari konsep penelitian yang ada 5 indikator dengan menggunakan teori koordinasi menurut Menurut Handayani (1994: 119) antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi
 - a. Informasi
 - b. Alur Informasi
 - c. Teknologi Informasi
 - d. Pertemuan
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a. Pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b. Ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
 1. Pejabat yang berwenang terlibat
 2. Ahli di bidang pembangunan yang terlibat
 3. Anggaran
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - a. Bentuk kesepakatan

- b. Pelaksana kegiatan
 - c. Sanksi bagi pelnggar kesepakatan
 - d. Insentif bagi pelaksana koordinasi
5. Kontinuitas Perencanaan
- a. Feedback dari obyek dan subjek pembangunan
 - b. Perubahan terhadap hasil kesepakatan

1. komunikasi

Komunikasi adalah hal terpenting dalam melakukan kegiatan koordinasi. Maksudnya komunikasi ini dapat dilihat dengan ada tidaknya informasi, alur koordinasi dan ada tidaknya teknologi informasi serta ada tidaknya pertemuan saat melakukan koordinasi

a. Informasi

Informasi adalah sekumpulan data kebijakan atau keputusan yang diproses dan dikelola, dikirim dan diterima oleh individu atau kelompok. Pada sub indikator ini peneliti melakukan wawancara mengenai informasi adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat SDGs Provinsi Riau) terkait dengan informasi yaitu sebagai berikut:

“Informasi yang sering kami berikan terkait capaian SDGs dan menyampaikan isu-isu sekarang, misal pada kesehatan fokus penanganan covid tapi kami sampai kan juga isu – isu yang urgen misal tentang program stunting di Riau yang akan dibahas di kelomok kerja”.
(Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas informasi sering di berikan kepada Filantropi yang berkaitan tentang *SDGs*. Menurut Gardon B Davis (2015 : 8) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Informasi yang telah dilakukan oleh bidang dan pemerintahan dan pembangunan manusia sekaligus menjadi kelompok kerja yang mengurus *SDGs* pada pilar sosial ini memberikan apapun informasi yang berkaitan *SDGs* kepada Filantropi agar kegiatan *SDGs* Provinsi riau dapat dilakukan bersama sesuai data yang diberikan.

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat *SDGs* badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator informasi pada indikator komunikasi yaitu sebagai berikut:

*“Aktivitas sekarang kami tetap melakukan koordinasi dalam pelaksanaan *SDGs* ini, dengan keadaan sekarang sebagian fokus ke penanganan covid Filantropi juga ada. Kami selalu diskusi mengenai isu-isu *SDGs* dengan Filantropi dan lembaga Pemerintah lainnya. Dengan cara zoom meeting”. (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB).*

Berdasarkan wawancara diatas tentang informasi bahwasanya tetap melaksanakan koordinasi dengan memberikan informasi melalui diskusi secara online pada saat Covid-19. Menurut Kusriani (2007) informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna bagi pengguna yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. Dalam memberikan informasi pada wawancara ini lebih kepada berdiskusi untuk

mengumpulkan data dari Filantropi dan BAPPEDALITBANG agar menjadi suatu keputusan bersama.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator informasi pada indikator komunikasi yaitu sebagai berikut:

“Mengeni informasi yang berkaitan tentang SDGs biasaya di sampaikan melalui fgd /forum diskusi group. Selain itu informasi-informasi mengenai membahas isu-isu SDGs disampaikan sebelum rapat”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator informasi pada indikator komunikasi yaitu sebagai berikut:

“Ya. Selalu ada koordinasi berkala yang dilakukan untuk mendiskusikan progress pelaksanaan program. Kemitraan Tanoto Foundation di SDG Riau pada 2016-2020 tidak terbatas hanya pada pilar sosial, tetapi untuk kesemua (empat) pilar SDGs. Koordinasi dengan Bappeda utamanya di lakukan dengan Tim Sekretariat SDGs Prov Riau”. (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Filantropi mengenai informasi bahwasanya mereka mendapatkan informasi tentang *SDGs* melalui diskusi. Informasi himbuan untuk diskusi tersebut disampaikan oleh tim sekretariat *SDGs* BAPPEDALITBANG. Tujuan dilakukan diskusi agar keputusan yang diambil bisa di setuju bersama antara kemitraan.

Kemudian berdasarkan observasi penelitian terkait sub indikator informasi pada indikator komunikasi peneliti menemukan informasi ajakan untuk berdiskusi mengenai *SDGs* melalui media Whatsapp.

Selanjutnya berdasarkan dokumen yang menjadi informasi antara kemitraan *SDGs* Provinsi riau adalah dokumen perkembangan pelaksanaan *SDGs* Provinsi riau 2017-2020. Dokumen ini berisi tentang pelaksanaan *SDGs*, status capaian *SDGs* dan hambatan pelaksanaan beserta soslusinya.

Adapun hasil wawancara, observasi dan dokumen penelitian mengenai informasi bahwasanya dalam melakukan koordinasi setiap kemitraan mempunyai data dalam melaksanakan *SDGs* Provinsi riau. Menurut Kusriani (2007) informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna bagi pengguna yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. Fialntropi dikoordinasikan oleh tim sekretariat *SDGs* untuk memberikan informasi mengenai *SDGs* kepada Filantropi. yang dilakukan tim sekretariat *SDGs* memberikan informasi tentang diskusi mengenai isu-isu *SDGs* melalui media whatsapp, yang mana setiap pelaku koordinasi mempunyai data tentang *SDGs* agar keputusan yang di buat bisa diterima semua kemitraan melalui diskusi. Hasil daripada diskusi atau forum diskusi grup (FGD) yaitu terbentuknya dokumen perkembangan pelaksanaan *SDGs* Provinsi riau 2017-2020 yang menjadi informasi kepada semua pihak serta untuk mengambil keputusan yang akan datang.

b. Alur Koordinasi

Alur koordinasi adalah proses melakukan koordinasi agar kegiatan-kegiatan dapat di arahkan sesuai rencana dalam mencapai tujuan. Alur koordinasi ini sangat dipelurkan dalam mecapai tujuan organisasi. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti mengenai alur koordinasi dalam melaksanakan koordinasi Filantropi dengan bidang pemerintahan dan poembangunan manusia bappedalitbang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat *SDGs* Provinsi Riau) terkait dengan alur koordinasi yaitu sebagai berikut:

*“alur koordinasi yang kami lakukan pada kelompok kerja sesuai arahan tim pengarah, kan kita bertugas di bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia sekaligus kita menjadi ketua pada tim kelompok kerja. Pada saat ini yang melakukan koordinasi pada Filantropi adalah Ibu tuti selaku sekretariat *SDGs* bappedelitbang”*. (Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat *SDGs* badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub

indikator alur koordinasi pada indikator komunikasi yaitu sebagai berikut::

“Alur koordinasi dari Gubernur sebagai tim pengarah, tim pelaksana, tim kelompok kerja, nah kami di sekretariat yang berkomunikasi dengan beberapa Filantropi”. (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan **Bapak M. H. Iksan, S,IP** selaku (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat *SDGs* Provinsi Riau) dengan **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** selaku tim sekretariat *SDGs* BAPPEDALITBANG terhadap alur koordinasi dijelaskan bahwasanya yang melakukan koordinasi kepada Filantropi adalah tim sekretariat *SDGs* BAPPEDALITBANG sesuai arahan tim pelaksana dan tim pengarah kepada tim kelompok kerja dan juga sekretariat *SDGs* BAPPEDALITBANG. Sesuai dengan pendapat Jame D. Mooney koordinasi adalah sebagai pencapaian usaha kelompok secara tertur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator alur koordinasi pada indikator komunikasi yaitu sebagai berikut::

“Di bappada sekretariat SDGs dia terkonsentrasi di SDGs, secara koordinasi dengan bu tuti”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator alur koordinasi pada indikator komunikasi yaitu sebagai berikut:

“koordinasi selalu diadakan secara berkala oleh Ibu tuti selaku tim sekretariat SDGs BAPPEDALITBANG. Dalam koordinasi tersebut membahas perkembangan kegiatan kami di tanoto foundation dan mengenai SDGs lainnya”. (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan wawancara **Bapak Ali Bastoni** dan **Bapak Dendi Satria Buana** selaku pihak Filantropi tentang alur koordinasi bahwasanya filantropi dikoordinasikan melalui tim sekretariat SDGs. Sebagai anggota kelompok kerja disini Filantropi mengikuti arahan dari tim sekretariat SDGs bappedalitbang.

Adapun observasi penelitian terkait dengan sub indikator alur koordinasi pada indikator komunikasi yang peneliti temukan dilapangan bahwa alur koordinasi yang di lakukan BAPPEDALITBANG melalui tim sekretariat SDGs BAPPEDALITBANG kepada Filantropi. Namun pada kelompok kerja tidak melakukan koordinasi kepada anggotanya termasuk Filantropi, sementara pada tim kelompok kerja pilar sosial terdapat Filantropi sebagai anggota. Setelah ditelusuri alur koordinasi tersebut berbeda dengan pedoman dari BAPPENAS. Pada saat wawancara dikatakan bahwa alur koordinasi sudah sinkron dengan pedoman dari

pusat. kemudian peneliti pastikan mengapa koordinasi dilakukan oleh sekretariat karena agar mudah melakukan koordinasi dari BAPPEDALITBANG. Hal tersebut dapat berakibat fatal pada pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja pilar sosial karena bukan anggota kelompok kerja.

Dilihat dari dokumen keputusan Gubernur tentang tim koordinasi daerah pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau 2020/2024 bahwasanya pada kelompok kerja pilar sosial ketuanya adalah kepala bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia BAPPEDALITBANG. pada dokumen pedoman skala nasional dan Provinsi Riau alur koordinasi sangat berbeda dengan pedoman koordinasi dari BAPPENAS, perbedaan alur koordinasi tersebut ada pada bab 1.

Kemudian hasil wawancara, observasi dan dokumen penelitian bahwasanya pada alur koordinasi ini mulai dari Gubernur, kepala bappedalitbang, tim pelaksana, kelompok kerja, sekretariat *SDGs*. Menurut Jame D. Mooney, koordinasi adalah usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Pada pelaksanaan koordinasi *SDGs* kepada Filantropi ini adalah tim sekretariat *SDGs* saja, sementara pada kelompok kerja tidak melakukan koordinasi kepada anggotanya salah satu filantropi atau tim sekretariat *SDGs* bappedalitbang secara penuh melakukan koordinasi kepada Filantropi. karena disini tim koordinasi bappedalitbang memberikan delegasi tim sekretariat *SDGs* bappedalitbang lah yang melakukan koordinasi kepada Filantropi untuk membantu kelompok kerja pilar sosial (bidang pemerintahan dan pembangunan manusia) dan juga membantu

Filantropi dalam menyusun format-format laporan dalam pelaksanaan *SDGs* Provinsi riau.

c. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi agar informasi dapat di akses oleh kemitraan. Adanya teknologi informasi sangat memudahkan pada pelaksanaan koordinasi. berikut ini adalah hasil wawancara mengenai teknologi informasi kepada *key informan*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat *SDGs* Provinsi Riau) terkait dengan teknologi informasi yaitu sebagai berikut:

“kami dulu sudah menggunakan teknologi dalam menyebarkan informasi seperti website BAPPEDALITBANG tapi sekarang websitenya sedang diperbaiki agar lebih update. Sosial media kami sudah mulai update agar masyarakat tau tentang program BAPPEDALITBANG maupun tentang SDGs. Mengenai koordinasi kepada Filantropi kami lakukan secara email misal surat-menyurat melalui email. Apalagi dalam kondisi covid seperti ini kami dituntut semua hal dilakukan secara online dari surat menyurat tadi, rapat maupun berdiskusi secara online” (Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai teknologi informasi bahwasanya menggunakan media pendukung komunikasi saat ini, seperti website, sosial media maupun email. Salah satu ciri-ciri koordinasi adalah adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. BAPPEDALITBANG sudah mulai beradaptasi dengan kemajuan zaman sekarang, otomatis pelaksanaan koordinasi kepada Filantropi menjadi mudah.

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati**, **SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat *SDGs* badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator teknologi informasi pada indikator komunikasi yaitu sebagai berikut::

“ada, kami dalam melakukan koordinasi secara online kebetulan saya yang melaksanakan koordinasi dengan Filantropi, saya menggunakan aplikasi wa masseger untuk berkomunikasi menyampaikan informasi mengenai SDGs. Saat ini Covid-19 sekarang harus melakukan atau memanfaatkan media yang ada sekarang seperti melakukan pertemuan atau diskusi lewat media zoom meeting”. (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas mengenai teknologi informasi bahwasanya pelaksanaan koordinasi oleh tim sekretariat *SDGs* BAPPEDALITBANG kepada Filantropi dilakukan secara online. Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi (handayaniingrat 1992 : 119). Teknologi informasi sangat memudahkan tim sekretariat *SDGs* BAPPEDALITBANG dalam melakukan koordinasi kepada Filantropi.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator teknologi informasi pada indikator komunikasi yaitu sebagai berikut::

“Tentunya kami menggunakan teknologi sekarang karena kami sifatnya adaptif dengan keadaan sekarang. Misal Covid-19 dari BAPPEDALITBANG melakukan zoom meeting terkait isu-isu SDGs yang harus dilakukan selain penanganan Covid-19”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub teknologi informasi pada indikator komunikasi yaitu sebagai berikut:

“Teknologi informasi kami kira kami sudah menerapkan dari surat-menyurat kami dahulukan lewat email dahulu kepada BAPPEDALITBANG. Dan sekaqrang pada kondisi Covid-19 segala hal koordinasi harus dari teknologi seperti pertemuan melalui zoom-meeting serta komunikasi kami dengan tim sekretariat SDGs melalui WA massanger”. (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak Ali Bastoni** dan **Bapak Dendi Satria Buana** selaku Filantropi bahwa koordinasi dilakukan secara online oleh tim sekretariat SDGs kepada Filantropi. fungsi dan sistem koordinasi adalah merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari satuan kerga organisasi. Teknologi sebagai usaha agar tercapainya tujuan organisasi dan menggunakan media teknologi memudahkan surat-menyurat dan memberikan informasi menggunakan aplikasi cheating whatshapp serta saat kondisi Covid-19 melakukan diskusi isu-isu SDGs lewat aplikasi zoom meeting.

Adapun hasil observasi penelitian terkait dengan teknologi informasi pada indikator komunikasi bahwa dalam memberikan informasi melalui website BAPPEDALITBANG terkait SDGs, namun website tersebut masih dalam proses pembaharuan dan masih memakai data yang lama. Saat kondisi pendemi Covid-19 semua yang berhubungan dengan koordinasi pelaksanaan SDGs dilauan dengan memanfaatkan media online saat ini seperti bediskusi mengenai isu-isu SDGs yang dilakukan secara online melalui zoom meeting.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai teknologi informasi adalah tim sekretariat sedgs BAPPEDALITBANG menggunakan media teknologi dalam melakukan koordinasi seperti, website untuk menyebarluaskan informasi publik, email untruk surat menyurat dan whatsapp untuk melakukan koordinasi tanpa tatap muka dan pada saat covid menggunakan zoom meeting untuk melakukan diskusi. pada seluruh media tersebut website belum di update pada informasi-informasi yang terbaru.

d. Pertemuan

Pertemuan merupakan berkumpulnya minimal dua orang atau lebih untuk memutuskan uatu tujuan yang dilakukan organiasi pemerintah maupun non – pemerintah. Pertemuan salah satu bagian dari komunikasi agar koordinasi dapat berjalan dengan baik. Beikut ini adalah wawancara kepada *key informan* mengenai pertemuan pada koordinasi pelaksanaan *SDGs* Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakuan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat *SDGs* Provinsi Riau) terkait dengan pertemuan yaitu sebagai berikut

*“Selama covid Ada pertemuan beberapa tapi terbatas, paling satu dua kali kemudian secara daring. Pertemuan dilakukan secara fleksibel, sebenarnya paling tidak , ada pertemuan, tahun dulu secara besar 1 tahun 1x kemudian beberapa komunikasi tidak hanya dalam kerangka ini, dalam kerangka program lain kan yang sebenarnya sama dengan tujuan *SDGs* itu. kami selalu komunikasi tentang isu – isu yang sekarang misalkan stunting kami selalu membahas bagian kecil dari *SDGs*. Pertemuan tersebut juga membahas terkait program kerja , evaluasi dan hal -hal yang berkaitan isu sekarang. Lebih kepada koordinasi kita dengan pelaksanaan-pelaksanaan apa yg sudah dilakukan anggota koordinasi itu.secara kelembagaan terkait*

pencapaian SDGs. Mensinkronkan pendapat isu-isu sekarang”.
(Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas mengenai pertemuan bahwasanya pertemuan dilakukan satu atau dua kali dalam satu bulan. Kemudian dikatakan pertemuan dilakukan secara fleksibel dan tahun sebelumnya dilakukan satu tahun satu kali. Pada hakikat koordinasi, koordinasi terjadi akibat adanya rentang/jenjang pengendalian di mana pimpinan wajib membina dan mengarahkan. Pada wawancara ini pertemuan kelompok kerja pilar sosial belum terjadwal dengan baik atau kapan perlunya saja dengan Filantropi untuk mengadakan pertemuan dilihat dari banyaknya opsi pertemuan yang dilontarkan.

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat SDGs badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator pertemuan pada indikator komunikasi yaitu sebagai berikut::

“Kalau pertemuan dulu sering minimal 1 bulan itu ada kita melakukan pertemuan. Sebenarnya kami tidak menjadikan berapa kali pertemuan dalam satu tahun tapi kami mengkoordinasi paling tidak 3 bulan kami ada komunikasi untuk mengetahui proggres capaian SDGs dari kegiatan Filantropi”. (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pertemuan adalah pertemuan dilakukan minimal 1 bulan dilakukan dan melakukan pertemuan setiap tiga bulan dilakukan satu kali untuk mengetahui kemajuan setiap kegiatan. Salah satu ciri-ciri koordinasi adalah proses terus-menerus artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Pada pertemuan yang

dilakukan tim sekretariat *SDGs* ini tidak membatasi melakukan koordinasi dalam arti saat ada hal-hal yang penting akan melakukan pertemuan.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator pertemuan pada indikator komunikasi yaitu sebagai berikut::

*“Oh iya cukup rutin pertemuan membahas isu sosial gender setidaknya 1 bulan sekali, namun sekarang untuk pertemuan sudah kurang koordinatif sisi capaian saja . karna dulu seriang pada saat penyamaan framing penyusunan rad karna kami harus menyamakan persepsi apa itu *SDGs*, kegiatan Dompot dhufa apa yang termasuk capaian *SDGs*”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).*

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator pertemuan pada indikator komunikasi yaitu sebagai berikut:

*“Koordinasi selalu diadakan secara berkala bulan ini kami ada melakuan *SDGs* academy lewat zoom meeting, pertemuan sebenarnya dilakukan tidak tentu bisa 1 bulan sekali maupun 3 bulan sekali tergantung informasi yang akan disampaikan terkait perkembangan *SDGs*”. (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak Ali Bastoni** dan **Bapak Dendi Satria Buana** selaku Filantropi mengenai pertemuan adalah bahwasanya mereka sependapat yaitu mereka melakukan pertemuan setidaknya 1 bulan itu ada melakukan pertemuan dan paling maksimal 3 bulan 1 kali. Namun **Bapak Ali Bastoni** berpedapat akhir-akhir ini kurang koordinatif, pertemuan hanya membahas isu-isu *SDGs* dari segi capaian saja. Kalau awal-awal dulu sering melakukan pertemuan karena harus menyamakan persepsi tentang *SDGs*. Koordinasi adalah proses terus menerus, Sejak awal pelaksanaan koordinasi banyak

dilakukan karena banyak proses perancangan dari pembuatan RAD, Target indikator dan tim pelaksana *SDGs* Provinsi Riau. setelah selesai hanya perlu koordinasi sejauh mana realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah sinkron dengan tujuan *SDGs*.

Adapun hasil observasi penelitian yang ditemukan di lapangan bahwa BAPPEDALITBANG dan Filantropi melakukan pertemuan satu bulan satu kali, dilakukan secara zoom meeting saat Covid-19.

Kemudian dokumentasi yang peneliti temukan adalah foto bersama Filantropi bersama tim kelompok kerja pilar sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai pertemuan adalah pertemuan dilakukan satu kali dalam satu bulan dan pertemuan dilakukan kapan saja ketika ada sesuatu yang penting. Koordinasi adalah hasil akhir daripada komunikasi (Handyaningrat 1992 : 119). pada pelaksanaan pertemuan ini bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tidak intens dalam melakukan pertemuan selaku ketua kelompok kerja. Memang koordinasi kepada Filantropi dilakukan secara penuh oleh tim sekretariat *SDGs* tapi tetap di bawah arahan kelompok kerja dan juga harus ikut dalam melakukan pertemuan. Pertemuan dilakukan secara online pada saat Covid-19. Pada awal-awal pelaksanaan koordinasi *SDGs* sering dilakukannya pertemuan karena banyak hal-hal penting tentang kelanjutnya pelaksanaan *SDGs* Provinsi. Pada pelaksanaan koordinasi pertemuan ini tidak ada yang mengatur jadwal pertemuan dilakukan namun ada

jadwal melakukan laporan kegiatan Filantropi dan akan dibahas pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan *key informan* dan *informan* maka diperoleh informasi tentang komunikasi bahwasanya pelaksanaan koordinasi sudah diterapkan komunikasi antara kemitraan BAPPEDALITBANG dengan Filantropi. komunikasi Filantropi melalui tim sekretariat *SDGs* dengan memberikan informasi kepada Filantropi tentang *SDGs* Provinsi Riau. dalam memberikan informasi tersebut menggunakan teknologi untuk mendukung menyapaikan informasi seperti wa messenger dan email, Namun pada media website yang tidak dikelola dengan baik. Pada komunikasi ini kemitraan melakukan pertemuan minimal 1 kali dalam 1 bulan dan maksimal 1 kali dalam 3 bulan untuk mengetahui progres kegiatan Filantropi. Namun pada alur koordinasi ini komunikasi dilakukan tim sekretariat *SDGs* BAPPEDALITBANG yang tidak termasuk pada kelompok kerja. Sementara Filantropi adalah anggota dari kelompok kerja.

2. kesadaran pentingnya koordinasi

kesadaran pentingnya setiap masing-masing pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran akan pentingnya koordinasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan ketaatan terhadap hasil koordinasi. Setiap kegiatan walaupun dilakukan oleh masing-masing instansi tetapi diperlukan keselarasan kegiatan yang dilakukan. Setiap kegiatan yang

bekerjasama langsung dengan instansi lain harus dikerjakan secara maksimal dan butuh bantuan dari instansi lain.

a. Pengetahuan Pelaksana Terhadap Koordinasi

Pengetahuan adalah pemahaman Tim koordinasi dalam melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Baik itu pemahaman alur koordinasi, matrik RAD dan kegiatan yang ada dikelompok kerja pilar sosial serta laporan kegiatannya. Berikut ini adalah wawancara dan hasil wawancara dengan *key informan* mengenai pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat SDGs Provinsi Riau) terkait dengan pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi yaitu sebagai berikut :

“Kelompok kerja dibentuk adalah masing-masing kepala institusi Pemerintah dan non Pemerintah yang pasti mereka sudah berkompeten dalam pelaksanaan SDGs ini, kegiatan disusun bersama dan dilaksanakan masing-masing isntitusai. Dan posisi BAPPEDALITBANG menyusun data SDGs atas capaian masing-masing institusi”. (Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat SDGs badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi yaitu sebagai berikut::

“Anggota kelompok kerja sudah di bentuk sesuai perwakilan lembaga Pemerintah maupun lembaga non-Pemerintah yang notabene nya sudah mempunyai kemampuan dalam keanggotaan kelompok kerja dan dipercaya oleh lembaganya”. (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan **Bapak M. H. Iksan, S,IP** dan **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** selaku bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mengenai pengetahuan koordinasi adalah semua pelaksana paham dengan koordinasi pada pelaksanaan *SDGs* ini karena masing-masing perwakilan pemerintah dan non pemerintah termasuk Filantropi ikut serta dalam perancangan pelaksanaan *SDGs* ini. Salah satu ciri koordinasi adalah tanggung jawab koordinasi yang terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Pada pengetahuan pelaksana koordinasi ini anggota kelompok kerja pilar sosial adalah kepala atau pimpinan setiap intitusi pemerintah dan non-pemerintah termasuk Filantropi.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi sebagai berikut::

“Anggota kelompok kerja pada pembentukan tim pilar sosial saya rasa sangat sesuai dengan kemampuannya masing-masing bisa dilihat pada pembentukan rad kami memang diskusi untuk pembangunan Riau dengan latar belakang institui yang berbeda”.
(Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Sudah baik, karena kami lebih ke program pendidikan, dalam SDGs kami lebih ikut serta ke bidang pendidikan, tetapi bidang lain kami juga ikut serta dalam membahas isu-isu SDGs lainnya”. (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak Ali Bastoni** dan **Bapak Dendi Satria Buana** selaku Filantropi mengenai pengetahuan pelaksana terhadap bahwasanya tim pelaksana koordinasi di bentuk sesuai kemampuan masing-masing dan delegasi dari institusi yang ada di Provinsi Riau. Dan Filantropi ikut serta dalam kegiatan Mulai dari pemebentukan RAD *SDGs* Provinsi Riau dan diskusi mengenai isu-isu *SDGs* dan paham akan koordinasi yang dilakukan BAPPEDALITBANG.

Adapun hasil observasi peneliti temukan dilapangan terkait pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi bahwa pengetahuan dan kemampuan pelaksana koordinasi *SDGs* Provinsi Riau dibentuk sesuai keahlian dan bidang masing-masing, yang mana setiap tim pelaksana berbeda institusi.

Berdasarkan wawancara dan observasi mengenai pengetahuan dan kemampuan pelaksana koordinasi ini tentunya setiap pelaksana koordinasi paham dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pelaksanaannya. Karena seluruh perwakilan dari institusi pemerintah dan non-pemerintah termasuk filantropi ikut serta dalam perancangan pelaksanaan *SDGs* di riau dari awal.

b. Ketaatan Terhadap Hasil Koordinasi

Ketaatan terhadap koordinasi adalah patuh dalam melaksanakan sesuai dengan arahan dan keputusan pemimpin. Berikut ini adalah wawancara terhadap *key informan* mengenai ketaatan terhadap hasil koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat SDGs Provinsi Riau) terkait dengan ketaatan terhadap hasil koordinasi yaitu sebagai berikut :

“Semua anggota kelompok kerja melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan terlampir dalam matrik SDGs Pemerintah dan non-Pemerintah. Kalau di pedoman kan ada laporan semesteran dan ada tahunan, sebenarnya laporan juga sukarela pada pedoman SDGs dan tidak ada paksaan. Yang wajib itu pada Pemerintah BAPPEDALITBANG, indikator dipegang oleh bps setiap tahun mempublikasi data”. (Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas mengenai ketaatan hasil koordinasi ini menurut The Liang Gie (1993:14) koordinasi adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan. Pada ketaatan koordinasi disini dapat dilihat dari laporan Filantropi yang di serahkan kepada BAPPEDALITBANG. pada wawancara ini Filantropi melaksanakan kegiatan yang telah disusun pada matrik. Laporan kegiatan dilorkan setiap enam bulan satu kali dan satu tahun satu kali agar dapat melihat tugas-tugas yang telah dilaksanakan. Laporan yang dari Filantropi ini di gabungkan dengan anggota lain dan dipublikasi kan oleh pada institusi BPS.

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat SDGs badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator ketaatan terhadap hasil koordinasi pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi yaitu sebagai berikut::

“semua hal yang berkaitan dengan SDGs kami diskusikan melalui fgd, apalagi saat pembentukan rad kami lebih intens melakukan diskusi

sehingga sekarang ada pedoman rencana aksi daerah dan di setuju bersama. Diluar dari pada itu kami mereka menunggu arahan saja, maksudnya apabila kami ada rapat mengenai SDGs kami libatkan mereka dan mereka hadir seperti itu”. (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas mengenai ketaatan koordinasi tim sekretariat SDGs selalu mengikuti arahan dari kelompok kerja pilar sosial. G.R Terry dalam Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa koordinasi suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pada sasaran yang ditentukan. Pada ketaatan koordinasi ini melibatkan Filantropi dalam rapat atau bediskusi tentang SDGs agar Filantropi menjadi tahu perkembangan pelaksanaan SDGs Provinsi Riau.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator ketaatan terhadap hasil koordinasi pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Kami selalu ikut serta dalam membahas isu – isu mengenai SDGs baik itu diadakan oleh filantopi lain atau kami sendiri atau beppedalitbangnya. Kemudian mengenai laporan dilakukan pertahun, seingat saya pertahun dan data disampaikan di basis diskusi pernah buat evaluasi fgd evaluasi capaian SDGs riau nah dari itu kita terpapar dan yg mana menjadi tanntangan dan sudah tercapai. Memang ada namanya format valontry laporan, yang sifatnya kerelawanan, itu memang Riau belum coba, karna itu butuh waktu yg cukup tapi kami akan mengarah ke situ”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator

ketaatan terhadap hasil koordinasi pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Sudah baik, karena dilihat dari komitmen mereka dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Riau, masing – masing lembaga punya tugas masing seperti kami, kami lebih ke bidang pendidikan. Program yang kami lakukan di muat dalam matrik rad begitu pula institusi lain. Apapun yang di koordinasikan oleh sekretariat SDGs selalu kami tindak lanjuti”. (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak Ali Bastoni** dengan **Bapak Dendi Satria Buana** terkait ketatan hasil koordinasi adalah dalam pelaksanaan *SDGs* selalu ikut serta arahan. Melakukan pertemuan dan membahas isu-isu *SDGs*. Ketaatan terhadap hasil koordinasi dapat dilihat pada komitmen dan Filantropi selalu menindaklanjuti apapun yang dikoordinasi oleh tim sekretariat *SDGs* dan melakukan laporan hasil dari kegiatan.

Adapun hasil observasi peneliti temukan dilapangan terkait dengan sub indikator Tingkat ketaatan pelaksana terhadap koordinasi pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi bahwa Filantropi selalu mengikuti arahan dari tim sekretariat *SDGs* BAPPEDALITBANG mengenai pelaksanaan *SDGs* baik itu melaukan pertemuan maupun berdiskusi yang peneliti ikuti juga. kemudian mengenai laporan Filantropi melakukan laporan satu kali. Namun BAPPEDALITBANG tidak memberikan laporan *SDGs* Provinsi Riau yang sudah disusun dengan institusi lain kepada Filantropi.

Jika dilihat dari dokumen ketaatan pelaksana koordinasi peneliti memperoleh laporan data realisasi matrik non Pemerintah dan laporan tahunan tahun 2019 oleh

Filantropi kemudian laporan perkembangan pelaksanaan *SDGs* di Provinsi Riau oleh BAPPEDALITBANG.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai ketaatan pelaksana koordinasi ini selalu mengikuti arahan-arahan dalam koordinasi. yang mana Gubernur sebagai tingkat tertinggi pada koordinasi pelaksanaan *SDGs* Provinsi Riau. tingkat ketaatan pelaksana koordinasi ini juga bisa dilihat dari hasil kegiatan yang berupa laporan. Filantropi memberikan data realisasi kegiatan kepada tim sekretariat *SDGs* untuk di susun dengan institusi lainnya.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan *key informan* dan *informan* maka diperoleh informasi tentang kesadaran pentingnya koordinasi bahwasanya Filantropi paham adanya koordinasi selalu mengikuti arahan dan menindaklanjuti perintah dari BAPPEDAKLITBANG.

3. Kompetisi Partisipan

Kompetisi partisipan ini, melihat bagaimana peserta koordinasi ini mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bagaimana masing-masing stakeholders membuat program atau kegiatan baik yang dilakukan secara independen maupun berkoordinasi dengan instansi lain dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

a. Pejabat yang Berwenang Terlibat

Pejabat yang berwenang terlibat yaitu Ketua BAPPEDALITBANG dan ketua bidangnya serta pimpinan pada Filantropi yang ada di Provinsi Riau. Berikut

ini adalah wawancara terhadap *key informan* mengenai pejabat yang berwenang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat *SDGs* Provinsi Riau) terkait dengan Pejabat yang berwenang terlibat yaitu sebagai berikut :

Program SDGs dinaungi oleh kepala daerah yaitu Gubernur mempunyai peran penting dalam pelaksanaan SDGs ini, karna Provinsi Riau salah satu Provinsi yang menindaklanjuti peraturan presiden tentang SDGs. (Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas mengenai pejabat berwnang terlibat ini adalah Gubernur yang mempunyai peran penting terlaksananya program *SDGs* di Provinsi riau. menindaklanjuti peraturan presiden. Menurut Sondang P. Siangian organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang terdapat atasan dan bawahan. Pada pelaksanaan koordinasi dalam program *SDGs* ini Gubernur menjadi atasan untuk mengarahkan anggota-anggota mencapai tujuan.

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat *SDGs* badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator Pejabat yang berwenang terlibat pada indikator kompetensi partisipan yaitu sebagai berikut:

“Gubernur dan jajaran sebagai tim pengarah jadi hasil akhir capaian SDGs Riau akan disekrahkan kepada Gubernur untuk diserahkan ke pusat”. (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas mengenai pejabat yang berwenang terlibat ini adalah Gubernur. Peran Gubernur adalah menindaklanjuti perintah dari presiden untuk melaksanakan program *SDGs* di setiap Provinsi. Di dalam administrasi publik ada istilah top manager, middle manager dan low manager. Pada pelaksanaan koordinasi ini Gubernur menjadi middle manager. Apapun hasil dari koordinasi yang dilakukan pada kegiatan *SDGs* di provinsi riau menjadi tanggung jawab dan di laporkan ke tingkat pusat indonesia yaitu BAPPENAS.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator Pejabat yang berwenang terlibat pada indikator kompetensi partisipan yaitu sebagai berikut:

“Saya rasa pejabat yang berwenang dalam program SDGs ini Gubernur ya, karena kita Provinsi Riau adalah Provinsi yang merilis RAD setelah menindaklanjuti sk Gubernur amanah dari pp peraturan presiden”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas mengenai pejabat yang berwenang terlibat adalah Gubernur Provinsi riau untuk menindaklanjuti amanah dari peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Pradjudi Atmosudirjo organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan hubungan kerja antara kelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan (Atmosujidirjo, 1976).dalam ranka koordinasi ini agar keputusan presiden di tidaklanjuti Gubernur riau agar tujuan dapat tercapai.

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator

Pejabat yang berwenang terlibat pada indikator kompetensi partisipan yaitu sebagai berikut:

“Koordinasi dengan Bappeda utamanya di lakukan dengan Tim Sekretariat SDGs Prov Riau (Ketua, Wakil dan Sekretaris, dan Tim).” (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pejabat yang berwenang terlibat adalah kepala BAPPEDALITBANG beserta jajaranya. Menurut Geoge R. Terry ddalam Handari Nawai (2003:36), manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Pada pelaksanaan koordinasi SDGs Provinsi riau ini, yang bertanggung jawab adalah BAPPEDALITBANG untuk pelaksaasn SDGs ini. BAPPEDALITBANG menjadi institusi yang dipercaya untuk mengurus pelaksaasn koordinasi SDGs ini karena tugasnya tidak jauh dengan tujuan SDGs yaitu membangun daerah.

Adapun hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan adalah kepala BAPPEDALITBANG dan Kepala-kepala bidangnya yang ikut serta dalam kegiatan diskusi mengenai isu-isu SDGs Provinsi Riau.

Kemudian dokumentasi yang ditemukan saat penelitian mengenai pejabat yang berwenang adalah Presiden pada dokumen peraturan presiden nomor 59 tahun 2017, Kepala BAPPENAS pada dokumen koordinasi,pemantauan dan evaluasi SDGs dan Gubernur Riau pada dokumen SK tentang tim koordinasi serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam SK tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai pejabat yang terlibat adalah seluruh stakeholder pemerintahan terlibat. Karena tertuang

pada SK Gubernur Riau dalam pelaksanaan *SDGs* sebagai tim koordinasi atau pun tim pelaksana program *SDGs*. Dalam membangun daerah yang tujuannya sangat banyak sangat penting keterlibatan semua pihak, termasuk Filantropi yang membantu membangun daerah.

b. Ahli Di Bidang Pembangunan yang Terlibat

Ahli pembangunan yang terlibat adalah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan pada bidang pembangunan. Pada pelaksanaan *SDGs* tim koordinasi melibatkan para ahli bidang pembangunan dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Berikut ini adalah wawancara terhadap *key informan* mengenai ahli pembangunan yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat *SDGs* Provinsi Riau) terkait dengan ahli di bidang pembangunan yang terlibat yaitu sebagai berikut :

“Dalam kelompok kerja ada akademisi barbagi universitas yang terlibat, semua aktor pemerinthan terlibat dalam pembangunan ini seuai keahliannya masing-masing”. (Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dalam membangun daerah beberapa ahli dalam pembangunan dari universitas sangat terlibat. Seperti yang kita ketahui dalam arti manajemen memanfaatkan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan. Keterlibatan akdemisi dan para ahli agar perencanaan dalam membangun daerah tersusun dengan baik atau teratur menjadi pedoman pelaksanaan.

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat SDGs badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator ahli di bidang pembangunan yang terlibat pada indikator kompetensi partisipan yaitu sebagai berikut:

“Semua capaian dalam perencanaan capaian SDGs melalui diskusi beberapa akademisi yang sudah melakukan penelitian mengenai pembangunan di Riau”. (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak M. H. Iksan, S,IP** dan **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** selaku bagian dari BAPPEDALITBANG bahwasanya dalam membangun daerah beberapa ahli dalam pembangunan dari universitas sangat terlibat. Seperti yang kita ketahui dalam arti manajemen memanfaatkan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan. Keterlibatan akademisi dan para ahli agar perencanaan dalam membangun daerah tersusun dengan baik atau teratur menjadi pedoman pelaksanaan.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator ahli di bidang pembangunan yang terlibat pada indikator kompetensi partisipan yaitu sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan SDGs di Riau ini Gubernur juga ada dan pastinya dia sudah berdiskusi dengan ahli-ahli dan analisis pembangunan Riau ini disampaikan ke tim pelaksana dan kelompok kerja. Dan kami juga dalam bertindak selalu mengadakan fgd membahas isu-isu terkini mengenai SDGs di Riau”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator

ahli di bidang pembangunan yang terlibat pada indikator kompetensi partisipan yaitu sebagai berikut:

“Ada. SDG Center UNRI dan mitra perguruan tinggi lokal di 7 kab/kota yang didampingi” (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak Ali Bastoni** dan **Bapak Dendi Satria Buana** selaku Filantropi mengenai ahli yang terlibat dalam pembangunan ini diskusi Gubernur antara ahli-ahli pembangunan di Riau yang sampaikan ke tim pelaksana maupun kelompok kerja dan pada kelompok kerja terdapat bagian *SDGs center* yang anggotanya dari universitas Riau. Menurut Sondang P. Siagian administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam mencapai tujuan. Melakukan koordinasi dengan cara berdiskusi dengan ahli-ahli adalah suatu usaha dalam merancang perencanaan kegiatan dan agar tujuan tepat sasaran.

Adapun hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan adalah kelompok kerja dan tim sekretariat *SDGs BAPPEDALITBANG* melakukan zoom meeting membahas tentang perkembangan *SDGs* di Provinsi Riau.

Kemudian dokumentasi yang peneliti temukan adalah foto bersama akademisi universitas yang ada di Riau dalam perancangan RAD. Dan Hasil susnan capaian indikator *SDGs* dan Narasi RAD *SDGs* Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai ahli yang terlibat dalam pembangunan ini pada pelaksanaan koordinasinya sangat diperlukan untuk menganalisis pembangunan di Riau. Para ahli berasal dari

universitas yang ada riau sebagai anggota kelompok kerja untuk berdiskusi dari perancangan sampai pelaksanaan *SDGs*.

c. Anggaran Partisipan

Anggaran partisipan adalah sumber daya untuk mencapai tujuan dalam rangka menjalankan organisasi dan merealisasikan kegiatan-kegiatan. Berikut ini adalah wawancara terhadap *key informan* mengenai anggaran partisipan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat *SDGs*

Provinsi Riau) terkait dengan anggaran yaitu sebagai berikut :

“Anggaran masing – maing karna SDGs adalah untuk mengukur capaian, bukan untuk ketika ada SDGs kita tambah anggaran. Tidak. Pelaksanaan program merekakan di sinkronkan dengan SDGs jadi kami hanya mendukung dan menyapaikan data-data SDGs di Riau”. (Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat *SDGs* badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub

indikator anggaran pada indikator kompetensi partisipan yaitu sebagai berikut:

“anggaran dari mereka sendiri karena kegiatan dari mereka juga setelah di sesuaikan dengan SDGs. Jadi tidak ada anggaran khusus Filantropi. Kalau di Pemerintahan dana rpjmd yang digunakan untuk pelaksanaan SDGs yang sudah diberikan masing-masing institusi yang ada di Provinsi Riau”.

Berdasarkan wawancara diatas mengenai anggaran partisipan selaku bagian dari BAPPEDALITBANG bahwa anggaran pada pelaksanaan kegiatan *SDGs* oleh

Filantropi menggunakan anggaran dari Filantropi sendiri. Pada model kemitraan ini disebut *mutualism partnership* (kemitraan mutualistik) yang merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang melakukan kerja sama yang saling memberikan manfaat sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Pada pelaksanaan koordinasi untuk merealisasikan kegiatan *SDGs* ini Filantropi menggunakan anggaran sendiri. Kegiatan tersebut memang dari Filantropi dan disesuaikan dengan tujuan *SDGs*.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator anggaran pada indikator kompetensi partisipan yaitu sebagai berikut:

“Kalaanggaran khusus dari Filantropi sendiri. Kalau bantuan dari Pemerintah tidak ada, justru, Pemerintah yang kita bantu”.
(Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator anggaran pada indikator kompetensi partisipan yaitu sebagai berikut:

*“Anggaran dari kami sendiri dalam melaksanakan kegiatan *SDGs*, tidak ada bantuan dari Pemerintah pada pelaksanaan kegiatan *SDGs*.”.*
(Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak Ali Bastoni** dan **Bapak Dendi Satria Buana** selaku Filantropi bahwasanya anggaran kegiatan di tanggung sendiri oleh Filantropi. kalau bantuan dari Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan *SDGs* tidak ada karena Filantropi yang membantu Pemerintah dalam membangun daerah. Karena kemitraan suatu bentuk kerja sama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan untuk mencapai tujuan. Filantropi menjadi lembaga yang memang

tugas membantu masyarakat khususnya. Dengan adanya program *SDGs* ini Filantropi ikut serta agar usaha atau kegiatan dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat dengan menggunakan sumber daya organisasinya sendiri khususnya anggaran..

Adapun hasil observasi yang dilakukan dilapangan mengenai anggaran peliti tidak menemukan sesuatu mengenai anggaran, namun peneliti menemukan dalam bentuk dokumen

Dilihat dari dokumen narasi RAD *SDGs* Provinsi Riau sumber pembiayaan pelaksanaan *SDGs* ini berasal dari sumber optimalisasi Pemerintah daerah, pembiayaan non-Pemerintah dan pembiayaan lainnya yang sah. Seperti laporan realisasi kegiatan Filantropi beserta anggaran dan dokumen implemtasi *SDGs* di Provinsi Riau yang sebagian isinya informasi anggaran dukungan pemerintah Provinsi Riau melalui RPJMD Provinsi Riau (2014-2019) terhadap pencapaian *SDGs*.

Tabel V.2 : Anggaran Filantropi

Nama Filantropi	Indikator alokasi anggaran			Realisasi anggaran		
	Tahun 2017	2018	2019	2017	2018	2019
Dompot dhuafa	7.886.923.285	1.852.980.000	2.172.720.000	3.788.853.170,00	7.206.117.726,89	5.236.601.203,35
Tanoto Foundation	2.307.500.000	964.750.000	-	-	-	-

Sumber: modifikasi data matrik non pemerintah & data dari Filantropi

Tabel V.3 : Anggaran Pelaksanaan *SDGs* Pemerintah Provinsi Riau (juta rupiah)

indikator	Alokasi anggaran (Rp)
Pemberantasan kemiskinan	2.798.510,90
Peniadaan kelaparan	187.345,21
Kesehatan yang baik	4.049.316,37
Pendidikan berkualitas	3.876.292,82
Kesetaraan gender	37.440,15

*Sumber: laporan data perkembangan pelaksanaan *SDGs* Provinsi Riau*

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai anggaran partisipan ini dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan Filantropi yang disesuaikan dengan tujuan *SDGs* pada realisasinya kegiatan Filantropi menggunakan anggaran sendiri dalam membantu membangun daerah.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan *key informan* dan *informan* maka diperoleh informasi tentang kompetensi partisipan bahwasanya pada pelaksanaan koordinasi kemitraan yang terlibat adalah para ahli dan para akademisi dari universitas yang ada di Riau serta seluruh pejabat terlibat seperti Gubernur. Filantropi pada pelaksanaan *SDGs* ini menggunakan anggaran sendiri dalam melaksanakan kegiatan yang telah sinkron dengan tujuan *SDGs* dan di koordinasi oleh tim sekretariat *SDGs* BAPPEDALIBANG.

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dapat diukur berdasarkan bentuk kesepakatan, sanksi bagi pelanggar kesepakatan dan insentif yang dikeluarkan bagi pelaksana koordinasi. Bagaimana Kesepakatan dan komitmen yang harus diagendakan (diprogramkan).

a. Bentuk Kesepakatan

Bentuk kesepakatan adalah kumpulan keputusan pada organisasi. Berikut ini adalah wawancara terhadap *key informan* mengenai bentuk kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat *SDGs* Provinsi Riau) terkait dengan bentuk kesepakatan yaitu sebagai berikut :

“Dalam kerangka, kesepakatan tidak ada hanya saja, meraka adanya kita yg minta data saja sesuai SDGs. Kesepakatan hanya pada sk”.
(Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat *SDGs* badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator bentuk kesepakatan pada Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Kesepakatrn dalam bentuk keputusan Gubernur Riau”. (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak M. H. Iksan, S,IP** dan **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** selaku bagian dari BAPPEDALITBANG bentuk kesepakatan terletak pada SK Gubernur. SK Gubernur yang dimaksud adalah keputusan Gubernur Riau nomor 1002/VI/2020 tentang tim koordinasi daerah pelaksanaan *SDGs* Provinsi Riau. Menurut Sulistiyani (2004:129) kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama atas dasar kesepakatan untuk mencapai tujuan. Pada pelaksanaan koordinasi ini pemerintah membuat kesepakatan dalam bentuk SK dengan Filantropi.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator bentuk kesepakatan pada Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Keterlibatan Dompot dhufa dalam sk Gubernur pada kelompok kerja”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator bentuk kesepakatan pada Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Tanoto Foundation membuat kesepakatan pemberian pendanaan dengan UNDP, sehingga UNDP memberikan laporannya kepada Tanoto Foundation. UNDP membuat kesepakatan (workplan bersama program dan kegiatan) dengan Bappeda selaku PIC sekretariat SDG Prov Riau”. (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak Ali Bastoni** dan **Bapak Dendi Satria Buana** selaku Filantropi bahwasanya bentuk kesepakatan terletak pada SK Gubernur. Kemitraan dengan Filantropi ini berlandaskan SK Gubernur tersebut sebagai perjanjian untuk saling memberikan manfaat dan mencapai tujuan.

Adapun hasil observasi peneliti temukan dilapangan bahwasanya setiap Filantropi memiliki SK Gubernur tersebut.

Kemudian dokumentasi yang peneliti temukan yaitu dokumen Keputusan Gubernur Provinsi Riau yang isinya tentang tim koordinasi pelaksanaan *SDGs* Provinsi Riau.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan mengenai bentuk kesepakatan ini adalah pada kemitraan yang terjalin antara

BAPPEDALITABNG dan Filantropi berlandaskan pada keputusan Gubernur tentang tim koordinasi pelaksanaan *SDGs* Provinsi Riau. pada keputusan tersebut Filantropi menjadi tim kelompok kerja pilar sosial dan yang menjadi ketua adalah kepal bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

b. Komitmen Pelaksana Kegiatan

Komitmen pelaksana kegiatan adalah kumpulan Individu dan kelompok yang beraktivitas mencapai tujuan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah wawancara terhadap *key informan* mengenai komitmen pelaksana kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat *SDGs* Provinsi Riau) terkait dengan komitmen pelaksana kegiatan yaitu sebagai berikut :

“Mereka tetap melaksanakan program mereka yang sinkron dengan tujuan SDGs, kan itu tadi kami tidak memaksakan mereka dalam hal ini, jadi memang program mereka sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun, jadi keterlibatan mereka untuk data kegiatan di Riau dalam mencapai SDGs 2030”. (Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai komitmen pelaksana kegiatan bahwasanya komitmen dapat dilihat pada Filantropi tetap melaksanakan kegiatan yang dirancang sebelumnya. Menurut Geoge R. Terry dalam Handari Nawawi (2000:36) manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunkan bantuan orang lain. Pada pelaksanaan kegiatan *SDGs* ini Filantropi telah ikut serta pada perancangan RAD sampai sekarang untuk

membantu membangun daerah itulah komitmen dari Filantropi kepada BAPPEDALITBANG.

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat SDGs badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator komitmen pelaksana kegiatan pada Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Komitmen kami dalam koordinasi kami selalu menyampai informasi mengenai SDGs yang ada di Riau karna merupakan bagian dari tugas kami, dan Filantropi juga sudah komitmen melaksanakan kegiatan SDGs pada saat louncing rad SDGs Provinsi Riau, walaupun saat ini Filantropi kesulitan dalam membuat laporan SDGs karena sebagian kegiatan Filantropi bergeser pada penanganan Covid-19”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Tim sekretariat SDGs selalu memberikan informasi terkait SDGs kepada Filantropi sebagai wujud komitmen. Menjalin kerja sama dengan baik sangat dibutuhkan antara kemitraan. Membantu Filantropi dalam menyusun laporan sebagai kesulitan Filantropi agar format laporan sesuai dengan yang dibutuhkan, agar tujuan dapat tercapai.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator komitmen pelaksana kegiatan pada Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Kalau dulu sangat aktif dan memang kami juga satu visi dengan mereka dan kami selalu diskusi tentang SDGs, kalau sekarang mungkin agak kurang ya karna fokus Pemerintah ke penangann covid. Dan kami masih aktif secara dari membahas isu – isu SDGs”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator

komitmen pelaksana kegiatan pada Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Komitmen kami dalam pelaksanaan SDGs ini kami selalu berusaha melaksanakan program kami dan di bantu oleh Ibu tuti dari tim sekretariat SDGs BAPPEDALITBANG”. (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak Ali Bastoni** dan **Bapak Dendi Satria Buana** selaku Filantropi mengenai komitmen pelaksana kegiatan ini Filantropi selalu melaksanakan arahan dari tim sekretariat SDGs BAPPEDALITBANG. Mengarahkan adalah salah satu fungsi manajemen agar tujuan tercapai dengan efisien. Komitmen Filantropi ini sudah dapat dilihat dari perennya dari awal perancangan RAD yang sering mengadakan diskusi dan mengikuti arahan dari BAPPEDALITBANG serta menjadi bagian dari kemitraan dalam pelaksanaan SDGS Provinsi Riau.

Adapun hasil observasi peneliti temukan dilapangan mengenai komitmen pelaksana kegiatan ini adalah tetap melakukan diskusi terkait isu-isu SDGs dan ikut serta dalam program SDGs Academy. SDGs Academy adalah kegiatan pembelajaran tentang SDGs skala nasional.

Kemudian dokumentasi peneliti temukan adalah dokumen laporan kegiatan-kegiatan tahunan Filantropi sebagai wujud komitmen.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai komitmen pelaksana kegiatan ini adalah antara kemitraan bekerja sama agar tujuan tercapai. Mengikuti setiap arahan-arahan agar masih tetap dijalur perencanaan yang disepakati bersama sebelumnya. Serta selalu ikut serta pada

kegiatan-kegiatan *SDGs* untuk berdiskusi langkah kedepan-nya dan melakukan laporan tahunan sebagai tanggung jawab antara kemitraan.

c. Sanksi Bagi Pelanggar Kesepakatan

Sanksi bagi pelanggar kesepakatan adalah hukuman ketika pelaksana kegiatan tidak melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Berikut ini adalah wawancara terhadap *key informan* mengenai sanksi bagi pelanggar kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat *SDGs* Provinsi Riau) terkait dengan sanksi bagi pelanggar kesepakatan yaitu sebagai berikut :

“Tidak ada sanksi, karna Filantropi hanya membantu dan tujuannya mengelompokan data hasil dari program dari Filantropi. Misal Filantropi tanoto foundation bidang pendidikan melakukan kegiatan di pelosok jadi kami dapatkan data tersebut bahwasanya wilayah terebut sudah ada yang membantu, jadi kegiatan yang sama bisa di lakukan di tempat lain”. (Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat *SDGs* badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator sanksi bagi pelnggar kesepakatan pada indikator Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi yaitu sebagai berikut:

*“Tidak ada, karena Filantropi lembaga yang membantu dalam capaian *SDGs* jadi konteknya sukarela”* (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak M. H. Iksan, S,IP** dan **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** bahwa sanksi pada pelanggar kesepakatan tidak ada, karena Filantropi membantu dari kegiatannya masing-masing dan konteksnya

sukarala. Salah satu model menurut Sulistiyani (2004:130) kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang saling memberikan manfaat lebih untuk mencapai tujuan. Berangkat dari hal tersebut nilai pentingnya melakukan kemitraan BAPPEDALITBANG dengan Filantropi dari organisasi yang berbeda melakukan kerja sama. Sehingga memperoleh saling silang antara BAPPEDALITBANG dan Filantropi ini.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator sanksi bagi pelnggar kesepakatan pada indikator Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada sanksi, seperti yang kita tau pada pedomen itu kami adalah voluntery atau kami sifatnya membantu jika ada 100% kami 2 % bersama tanoto foundation. Kan konteknya sanksi ya misal pada program kerja lah kami tidak melaksanakan salah satu program bukan berarti kami dapat sanksi sesuai pedoman RAD SDGs. Mungkin saja kan kami ada kendala anggaran dan segala macam menjadi tidak terlaksana kegiatan”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator sanksi bagi pelnggar kesepakatan pada indikator Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada, karena setiap lembaga sudah menjalankan peran sesuai kapasitas masing-masing”. (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak Ali Bastoni** dan **Bapak Dendi Satria Buana** selaku Filantropi bahwa tidak ada sanksi pelaksana koordinasi karena Filantropi sifatnya membantu Pemerintah dan setiap pelaksana menjalankan peran

sesuai kapasitasnya masing-masing. Menurut W.K Kellog Foundation Filantropi merupakan sesuatu tindakan memberikan uang, waktu dan pengetahuan bagaimana cara mengembangkan kebaikan bersama. Kegiatan-kegiatan *SDGs* ini dilaksanakan secara penuh oleh Filantropi untuk membangun daerah untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun hasil observasi peneliti temukan dilapangan mengenai sanksi pada pelaksana koordinasi tidak ada sanksi yang dilakukan maupun bentuk peringatan ketika Filantropi tidak melaksanakan kegiatan yang telah disusun pada matrik non-pemerintah.

Dilihat dari dokumen narasi rencana aksi daerah *SDGs* Provinsi Riau bahwasanya Filantropi sifatnya sukarela dalam membantu membangun daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai sanksi bagi pelanggar kesepakatan tidak ada dilakukan sanksi apapun ketika tidak melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelanggaran kesepakatan yang peneliti maksud disini adalah saat Filantropi tidak melaksanakan kegiatan yang telah sinkron dengan tujuan *SDGs* pada matrik kegiatan non-pemerintah yang disusun dan disepakati bersama. Tidak adanya sanksi kepada Filantropi karena lembaga sukara rela dalam membangun daerah yang tertuang pada narasi RAD *SDGs* Provinsi Riau serta sesuai kemampuan Filantropi tersebut dalam melaksanakan kegiatan yang di koordinasi BAPPEDALITBANG.

d. Insentif Bagi Pelaksana Koordinasi

Intensif bagi pelaksana koordinasi adalah imbalan atau penghargaan. Berikut ini adalah wawancara terhadap *key informan* mengenai insentif pelaksana kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat SDGs Provinsi Riau) terkait dengan insentif bagi pelaksana koordinasi yaitu sebagai berikut :

“Tidak ada, ketika mereka melakukan kegiatan, mereka menggunakan anggaran mereka, seperti itu aja, bukan berarti mereka melakukan kegiatan mereka mendapatkan anggaran khusus dari Pemerintah tidak ada”. (Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat SDGs badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator insentif bagi pelaksana koordinasi pada indikator Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada intensif apapun kami berikan kepada Filantropi kami pun tidak ada. Yang kami berikan kontribusi membangun daerah bersama stakeholder dan juga Filantropi maupun komunitas-komunitas yang ingin ikut bergerak dalam pelaksanaan SDGs”. (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak M. H. Iksan, S,IP** dan **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** bahwa tidak ada intensif bagi pelaksana koordinasi. pada kemitraan yang terjalin kerja sama dan memberikann manfaat-manfaat antara kemitraan. Filantropi melaksanakan kegiatan Untuk berkontribusi membangun daerah dengan menggunakan anggaran sendiri tanpa ada anggaran khusus pada kegiatan Filantropi.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator insentif bagi pelaksana koordinasi pada indikator Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Intensif bagi filantropi tidak ada karena kami membantu daerah dengan program yang telah disinkronkan dengan capaian SDGs”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator insentif bagi pelaksana koordinasi pada indikator Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada. Karena sesuai prinsip SDGs: kemitraan multi pihak, inklusivitas, kesetaraan, no one leave behind, dan bagi Pemda: Bottom up approach and ownership”. (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak Ali Bastoni** dan **Bapak Dendi Satria Buana** selaku Filantropi bahwasanya tidak ada intensif bagi pelaksana koordinasi. Karena Filantropi membantu dari program mereka sendiri yang telah sesuai dengan tujuan SDGs dan sesuai prinsip SDGs. Prinsip SDGs adalah pada koordinasi ini adalah no one left behind yang bermakna tidak seorang pun ditinggalkan, untuk mewujudkan prinsip ini pada praktek administrasi publik harus mampu memastikan 3 hal yaitu:

Pertama, memastikan bahwa semua pihak, pemangku kepentingan dan mitra yang terlibat. Untuk memastikan hal tersebut dengan cara membagi kelompok mitra SDGs seperti pemerintah dan parlemen, Filantropi dan dunia usaha, organisasi sipil masyarakat dan akademisi.

Kedua, pada administrasi publik memastikan tidak terjadi kasus-kasus including error dan excluding error. Kasus including error adalah kasus yang terjadi karena kesalahan telah memasukksan ataumelibatkan pihak-pihak yang tidak relevan, tidak mewakili siapa pun. Sementara kebalikannya, excluding error adalah kasus yang terjadi karena kesalahan telah mengabaikan atau mengeluarkan pihak yang relevan dan bisa sebagai wakil banyak pihak.

Ketiga, pada administrasi publik harus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat dari semua program dan kegiatan pencapaian target *SDGs*. Dalam hal ini memastikan memiliki data secara lengkap, terukur, akurat, akuntabel dan terbaru.

Adapun hasil observasi peneliti temukan dilapangan bahwa pada pelaksanaan kegiatan tidak ada insentif untuk pelaksana kegiatan karena pelaksanaan-pelaksanaan program *SDGs* merupakan tugas dari masing-masing institusi.

Pada dokumen narasi RAD pada point prinsip pelaksanaan *SDGs*. Prinsip tersebut dikenal dengan *No One Left Behind* atau Tidak ada seorangpun yang Tertinggal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait insentif bagi pelaksana kegiatan ini tidak ada. Karena Filantropi sifatnya sukarela dalam membantu membangun daerah. Pada kegiatan-kegiatannya memang kegiatan dari mereka sendiri dan rutin melaksanakannya. Kemudian kegiatan tersebut di sesuaikan dengan tujuan *SDGs* serta kegiatan tersebut dinilai sudah sesuai dengan

kemampuan Filantropi. Sesuai pada narasi RAD *SDGs* Provinsi Riau memang tidak ada insentif bagi pelaksana kegiatan atau pelaksana koordinasi.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan *key informan* dan *informan* maka diperoleh informasi tentang bahwasanya kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi Pelaksana koordinasi menggunakan SK Gubernur nomor 1002 tentang tim koordinasi *SDGs* Provinsi Riau yang terbaru sebagai bentuk kesepakatan. Antara kemitraan sudah ikut serta dari awal perancangan *SDGs* di Riau hingga sekarang dan pada pelaksanaan kegiatan tanpa ada insentif bagi pelaksana koordinasi. Namun pada sanksi jika tidak melaksanakan kegiatan tidak ada. Membuat BAPPEDALITBANG tidak bisa melakukan koordinasi dengan lebih karena Filantropi sifatnya sukarela.

5. Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan merupakan keberlanjutan dari keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

a. Feedback dari Obyek dan Subjek Koordinasi

Feedback juga disebut umpan balik adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau oleh Pemerintah dan non-Pemerintah. Berikut ini adalah wawancara terhadap *key informan* mengenai feedback antara kemitraan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat *SDGs* Provinsi Riau) terkait dengan feedback dari obyek dan subjek koordinasi yaitu sebagai berikut :

*“Sejauh ini baru data, sebenarnya kan data itu kan deri segi capaian pun bps melakukan pengukuran capaian juga”. Yang diberikan kepada Filantropi Analiis capaian – capaian *SDGs* agar mereka melaksanakan kegiatan yang telah sinkron dengan *SDGs* memang betul-betul tepat sasaran dan bermanfaat, tapi kami juga tidak memaksakan karna Filantropi sifatnya suka rela”. (Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas feedback yang diterima oleh BAPPEDALITBANG adalah hasil daripada kegiatan Filantropi. Pada model kemitraan mutualistik yang merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang menyadari aspek pentingnya kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat. Sementara BAPPEDALITBANG memberikan feedback kepada Filantropi adalah data-data capaian *SDGs* secara keseluruhan atau disusun agar Filantropi dapat membuat program bermanfaat dan tepat sasaran.

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat *SDGs* badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator feedback dari obyek dan subjek koordinasi pada indikator Kontinuitas Perencanaan yaitu sebagai berikut:

“Feedback dari mereka permintaan laporan agak susah, apalagi kegiatan perogramnya, paling rajin-rajin laporan dhompot duafa dan Tanoto Foundation”. (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas feedback yang diberikan pada koordinasi tim sekretarit *SDGs* merasa kesulitan ketika meminta laporan kegiatan. Dari 2

Filantropi yang memberikan konfirmasi bahwasanya ikut serta pada pelaksanaan *SDGs* hanya 1 yang rajin memberikan laporan sebagai feedback yang diberikan kepada BAPPEDALITBANG. Kesulitan tersebut karena tidak ada aturan yang mengharuskan Filantropi memberikan laporan kegiatan mereka, karena Filantropi sifatnya sukarela.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator indikator feedback dari obyek dan subjek koordinasi pada indikator Kontinuitas Perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. *“Feedback yang di dapat oleh Dompot Dhuafa yaitu :*
 - a. *Adalah menjadi satu upaya kita untuk memberikan satu keterlibatan masyarakat dalam isu pembangunan yang inklusif. Karna inklusifitas dalam membangun daerah itu tidak boleh eksklusif kan. Dulu kan situasi flantpom sebelum ada flatpom *SDGs* ini kan kita tidak tau Pemerintah itu ngapain gitu ya, kalupun dia kerja itu kan, masih sampai sekarang proyek cross gitu, modelnya proyek gitu, sebenarnya saya kritisi juga itu Pemerintah. Dengan adanya *SDGs* ini ada inklusifitas yang terbangun gitu, berarti ada keterbukaan ada keterkatikan yang lebih luas.*
 - b. *kita bisa berikan masukan yang memang saharusnya secara faktual diluar hierrkai Pemerintah. Karna Pemerintah, saya sering bicara kadang-kadang mau enak saja karna laporan nya bagus bagus aja tu. Persoalannya adalah itu jadi soal juga tu, kalau tidak dipaparkan dengan detail pasti nanti fokuskan anggaran tidak fikk gitu, nah apalagi politik dprd juga tmbah rumit, tidak mikir juga tidak fundamental yang sifatnya dapil yang programnya jangka pendek dan konsumtif, jadi tidak mendoripng basis produksi dan basis berkembang.*
 - c. *Pengerakan nasional – internasional bahkan hari ini dompet Dhuafa mendapatkan kesempatan juga mengikuti event *SDGs* sertifikat leader angkatan pertama, dann juga menjadi salah satu institui yang diminta untuk menjadi siswa *SDGs* academy. Dan disitu kita papar *SDGs* dan Riau mendapatkan secara khusus untruk mengikuti *SDGs* academy.*
 - d. *Kita juga bisa mendapatan kapastIbuilding jadi kita mendapatkan satu kesempatn fgd sdmnya teman-teman Filantropi.*

e. *Dompot Dhuafa jadi dikelal dan bisa memberikan masukan langsung jadi tidak usaha pakai demo jadi tinggal bisacara aja di forum. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).*

b. *Feedback Diberikan BAPPEDALITBANG*

Yang pasti secara capaian dari target itu bisa dianggap sebagai claim, tapi secara nyata kita telah banyak menyentuh secara langsung masyarakat-masyarakat yang variabelnya penentunya itu sangata berat digaris kemiskinan. Kan rakyat kita hanya ada dua kuncinya menguraingi beban belanja dan memperbanyak pendapatan. Dengan bantuan-bantuan Dompot Dhuafa terbantu dan beban berkurang, kita bantu biaya sembako, biaya kesehatan, sekolah”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** selaku Filantropi bahwasanya yang Dompot Dhuafa berikan yaitu bappedalitag sebagai platform memberikan masukan kepada Pemerintah secara langsung, keterlibatan Dompot Dhuafa, pergerakan nasional, kesempatan berdiskusi dengan Filantropi lain dan Dompot dapat dikenal. Sedangkan feedback dari BAPPEDALITBANG adalah mengurangi beban belanja dan memperbanyak pendapatan. Maksudnya dari segi *SDGs* Dompot Dhuafa membantu masyarakat dan melakukan pemberdayaan pada masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator feedback dari obyek dan subjek koordinasi pada indikator Kontinuitas Perencanaan yaitu sebagai berikut:

*“Peran ornop (organisasi non Pemerintah) seperti Tanoto Foundation melalui program PINTAR dan inisiatif lainnya di Riau (seperti program inisiatif kelapa sawit berkelanjutan di Pelalawan, dll) adalah untuk mendukung pencapaian *SDGs* di Riau. Timbal baliknya berupa hubungan kemitraan yang terjalin sangat baik dengan Bappeda untuk bersama-sama mendukung *SDGs* di Riau”. (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Bapak Dendi Satria Buana* selaku Filantropi bahwasanya Tanoto foundation berikan kepada BAPPEDALITBANG adalah tanoto melaksanakan program kegiatan pendidikan yang salah satu indikator tujuan *SDGs*. Kemitraan ini memakai model kemitraan kemitraan mutualistik yaitu saling memberikan manfaat. Sementara Timbal baliknya kepada BAPPEDALITBANG berupa bantuan dari Tanoto Foundation untuk mencapai tujuan *SDGs* di Provinsi Riau. Pada wawancara ini bahasa Filantropi ini hanya mendukung, setiap pihak juga mendukung kegiatan *SDGs* di Riau, namun tidak sedikit juga pihak melakukan kegiatan yang telah disusun pada matrik program *SDGs* Provinsi Riau.

Adapun hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan adalah antara kemitraan ini melakukan diskusi, bertukar pikiran melalui zoom meeting. Saling melengkapi kekurangan antara sesama.

Kemudian dokumentasi yang peneliti temukan adalah data laporan tahunan Filantropi.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai feedback pelaksana koordinasi ini bahwasanya feedback yang diberikan Filantropi kepada BAPPEDALITBANG adalah data-data hasil kegiatan mereka dalam membangun daerah. Sedangkan feedback yang diberikan BAPPEDALITBANG kepada Filantropi adalah hasil perkembangan *SDGs* di Provinsi Riau dan memberikan

ruang Filantropi berdiskusi serta memberikan masukan kepada pemerintah secara langsung.

b. Perubahan Terhadap Hasil Kesepakatan

Perubahan terhadap hasil kesepakatan adalah membuat keputusan kembali untuk tercapainya tujuan. Berikut ini adalah wawancara terhadap *key informan* mengenai perubahan hasil kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* oleh **Bapak M. H. Iksan, S,IP** (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pemuda, Sekretariat *SDGs* Provinsi Riau) terkait dengan perubahan terhadap hasil kesepakatan yaitu sebagai berikut :

*“Perubahan, sesuai acuan dari bappenas pedoman na berubah pilar sosial meta data 2 namanya, jada meta dua mulai ditetapkan 2020 indikatornya di seuaikan lagi daripada sebelumnya. Posisi BAPPEDALITBANG manfasilitasi program *SDGs* dan mengumpulkan data tetapi anggaran dari Filantropi.apalagi covid, sebelum covid kegiatan lumayan juga. Isu sadar api”. (Wawancara : Rabu 07 Juli 2021, Pukul 14.20 WIB).*

Adapun hasil wawancara dengan *informan* oleh **Ibu Tuti Rahmawati, SP,M.KM, M.Med.Sc** (sekretariat *SDGs* badan perencanaan pembangunan daerah penelitian) terkait sub indikator perubahan terhadap hasil kesepakatan pada indikator Kontinuitas Perencanaan yaitu sebagai berikut:

“Ada beberapa data yang berubah seperti indikator meta pilar sosial di rilis yang terbaru menjadi meta dua pilar sosail maupun pilar lainnya”. (Wawancara : 21 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa perubahan terhadap hasil kesepakatan adalah pembaharuan pengukuran indikator pilar sosial yang disebut dengan meta data pilar sosial 2 yang sebelumnya meta data pilar sosial. dijelaskan juga

bahwasanya posisi BAPPEDALITBANG adalah memfasilitasi program *SDGs*. Maksud dari memfasilitasi adalah untuk mengelola partisipasi kemitraan *SDGs*, pada praktek *SDGs* Administrasi publik peran fasilitator dengan rincian tugas sebagai berikut.

- a. Sebagai motivator : menggerakkan, memberikan dorongan motivasi kepada mitra tentang masalah bersama yang dihadapi dan harus bersama dan bekerja sama untuk mencapai target *SDGs*.
- b. Sebagai komunikator : menyampaikan semua informasi tentang rencana program dan kegiatan *SDGs*.
- c. Sebagai mediator : membantu pihak berdiskusi dan berdialog tentang pelaksanaan *SDGs*, menerima kritik dan saran, tidak memutus atau memaksakan pandangan selam proses diskusi.
- d. Sebagai katalisator : memimpin langkah-langkah perubahan yang diperlukan untuk mencapai targat *SDGs* secara efektif.
- e. Sebagai dinamisator : menciptakansuasana yang kondusif dan mendorong seluruh mitra untuk terus bergerak tanpa lelah menemukan kreasi dan inovasi pencapaian *SDGs*.

Kemudian hasil wawancara dengan *informan* oleh **Bapak Ali Bastoni** (kepala cabang Dompot Dhuafa Provinsi Riau) terkait sub indikator perubahan terhadap hasil kesepakatan pada indikator Kontinuitas Perencanaan yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada perubahan atas kesepakatan dari tim sekretariat SDGs BAPPEDALITBANG, tapi saya belum tau mungkin ada pembaharuan terbaru mengenai SDGs di Riau”. (Wawancara 04 Agustus 2021, Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan **Bapak Dendi Satria Buana** (Project Manager Tanoto Foundation Provinsi Riau) terkait sub indikator perubahan terhadap hasil kesepakatan pada indikator Kontinuitas Perencanaan yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada perubahan, semua berjalan sesuai yang telah disepakati”. (Wawancara 06 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara **Bapak Ali Bastoni** dan **Bapak Dendi Satria Buana** selaku Filantropi bahwa tidak ada perubahan terhadap hasil kesepakatan mengenai pelaksanaan *SDGs* Provinsi Riau. Namun **Bapak Ali Bastoni** menduga adanya pembaharuan terbaru mengenai *SDGs* Riau dilihat dari kata mungkin. Salah satu fungsi koordinasi adalah menyampaikan informasi-informasi terkait tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula terhadap perubahan ini tidak diketahui akan menjadi sedikit hambatan kepada Filantropi tidak tau perkembangan mengenai *SDGs*.

Adapun hasil observasi penelitian terkait dengan sub indikator perubahan terhadap hasil kesepakatan pada indikator Kontinuitas Perencanaan bahwa ada perubahan analisis indikator capaian *SDGs* pada pilar sosial yang awalnya meta data pilar sosial di ubah menjadi meta data pilar sosial 2. Peneliti temukan pada website biro pusat statistik (BPS) Provinsi Riau. Dan pihak Filantropi tidak tau perubahan tersebut.

Kemudian dokumentasi terkait perubahan adalah meta data pilar sosial di ubah menjadi meta data pilar sosial 2.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi perubahan hasil kesepakatan ini terdapat pada pengukuran indikator capaian *SDGs* meta data pilar sosial menjadi meta data pilar sosial 2. Perubahan ini terjadi karena hasil laporan

perkembangan *SDGs* Provinsi Riau dan dilakukan pembaharuan agar menjadi pedoman kedepan. Perubahan ini Filantropi belum mengetahui sebagai bahan pedoman untuk kedepan dan tim koordinasi BAPPEDALITBANG belum memberikan data tersebut. Setelah ditelusuri perubahan tersebut dilakukan BPS Provinsi Riau.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan *key informan* dan *informan* maka diperoleh informasi tentang kontinuitas perencanaan bahwasanya pelaksana koordinasi yang menjadi kemitraan memperoleh keuntungan antara pihak yang bermitra. Filantropi dapat bersandingan dengan pemerintah dalam memberikan masukan dan membuat kegiatan sesuai kebutuhan daerah serta BAPPEDALITBANG dapat keuntungan mendapatkan data dari kegiatan Filantropi.

C. Faktor Penghambat Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial)

1. Pandemi Covid-19

Faktor Penghambat Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan adalah Pandemi Covid-19. Aktivitas koordinasi kepada filantropi menjadi berkurang mengenai pelaksanaan *SDGs* Provinsi Riau. karena aktivitas filantropi bergeser pada penanganan covid-19.

2. Keterbatasan Data Capaian *SDGs* Provinsi Riau

Kesulitan memperoleh data dalam pelaksanaan *SDGs* menjadi sulit mengarahkan Filantropi. Kesulitan ini diakibatkan karena banyaknya aktor dalam *SDGs* ditambahkan sebagian aktor tidak paham akan koordinasi *SDGs*. Data bukan hanya dari BAPPEDALITBANG namun dari seluruh stakeholder yang terlibat di Provinsi Filantropi harus punya data dalam pelaksanaan membangun daerah karena mereka bersifat sukarela dalam melakukan kegiatan *SDGs*. Dengan adanya data Filantropi akan merasakan pelaksanaannya bermanfaat.

3. Kooperatif

Koordinasi yang dilakukan sudah baik sesuai alur koordinasi namun kerja sama dalam kegiatan *SDGs* menjadi salah satu penghambat koordinasi yang baik. Keterlibatan Filantropi atau seluruh aktor yang kurang dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan aktor pemerintah maupun Filantropi. kegiatan yang telah disusun pada matrik *SDGs* dilakukan institusi yang bertanggung jawab saja tanpa melibatkan kelompok kerja.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan judul “Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial)”, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi Filantropi dengan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau (studi pilar sosial) ini koordinasi yang dilakukan oleh bidang pemerintahan dan pembangunan manusia BAPPEDALITBANG terjadi masalah komunikasi pada alur koordinasi yang belum sesuai dengan pedoman *SDGs* Nasional yang dilaksanakan kepada filantropi sehingga program yang direncanakan dan dikoordinasikan kepada Filantropi menjadi terhambat.
2. Faktor penghambat koordinasi Filantropi dengan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau (studi pilar sosial) ini adalah pandemi covid-19 yang mana aktivitas koordinasi *SDGs* berkurang, keterbatasan data *SDGs* sehingga tidak bisa mengkoordinasi program filantropi dan kurangnya kerja dengan filantropi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk BAPPEDALITBANG dan Filantropi serta kemitraan yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi pada saat kondisi Covid-19 agar tetap melakukan koordinasi dengan cara menggunakan teknologi saat ini. Walaupun sebagian kegiatan bergeser pada penanganan Covid-19 harus tetap diarahkan seperti berdiskusi tentang isu-isu *SDGs*.
2. Untuk bidang pemerintahan dan pembangunan manusia selaku ketua kelompok kerja harus mengumpulkan laporan lebih maksimal dengan cara meminta langsung kepada anggota kelompok kerja pilar sosial yang isinya anggota seluruh perwakilan dari institusi pemerintah dan non-pemerintah dalam artian tidak menunggu laporan dari kemitraan.
3. Untuk ketua kelompok kerja pilar sosial (bidang pemerintahan dan pembangunan manusia) harus memastikan dan mengarahkan Filantropi dalam berkegiatan. Kegiatan Filantropi memang secara penuh dilakukan Filantropi sendiri. Jika tidak ada perkembangan dipastikan dan diarahkan serta lakukan kerja sama agar tujuan dapat tercapai.
4. Untuk BAPPEDALITBANG disarankan melakukan sinkronisasi alur koordinasi dari BAPPENAS dan untuk bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (ketua kelompok kerja pilar sosial) harus melakukan koordinasi langsung bukan melalui tim sekretariat *SDGs* BAPPEDALITBANG, karena ketua tugasnya mengkoordinasi. Dan tim

sekretariat *SDGs* ini tidak termasuk pada keanggotaan kelompok kerja pilar sosial, dimana pada kelompok kerja pilar sosial terdapat Filantropi.

5. Untuk bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan Tim Sekretariat *SDGs* BAPPEDALITBANG mempunyai kelemahan koordinasi pada kegiatan pelaporan dari Filantropi yang suka rela berpegang pada dokumen pada narasi RAD *SDGs* Provinsi Riau. disarankan untuk melakukan pendekatan secara personal atau menjalin hubungan baik kepada pihak Filantropi serta lebih banyak melibatkan Filantropi dalam kegiatan-kegiatan seperti diskusi agar tumbuh rasa tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Handayani, Soewarno. 1994. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2005. *Kepemerintahan Dan Kemitraan*. Malang: CV. SOFA Mandiri Dan Indonesia Print.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. *Dasar – Dasar Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2018. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Kota Depok: PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Santoso, Djonet. 2019. *Administrasi Publik (Tujuan pembangunan Berkelanjutan)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Siagian, Sondang P. 2015. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2017. *Administrasi Pembangunan Konep, Dimensi, Dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, Ernie Tidnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wibowo. 2018. *Kepemimpinan Pemahaman Dasar Dan Pandangan Konvensional Gagasan Kontenporer*. Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Zulkifli Dan Yogya, Moris Adidi. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Perss.

Zulkifli, Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.

Dokumentasi dan Rujukan

JURNAL

Filantropi Dan Pembangunan Oleh Universitas Udayana

Implementasi Sustainable Development Goals (Sdg's) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau Oleh Nelti Erwandari

Koordinasi Kelembagaan Desa Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy Kabupatenupaten Bandung Barat Oleh Yayat Rukayat

Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow) Oleh Bill A. Lumi

Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau Oleh Eko Handrian Dan Hendry Andry

DOKUMEN LAINNYA

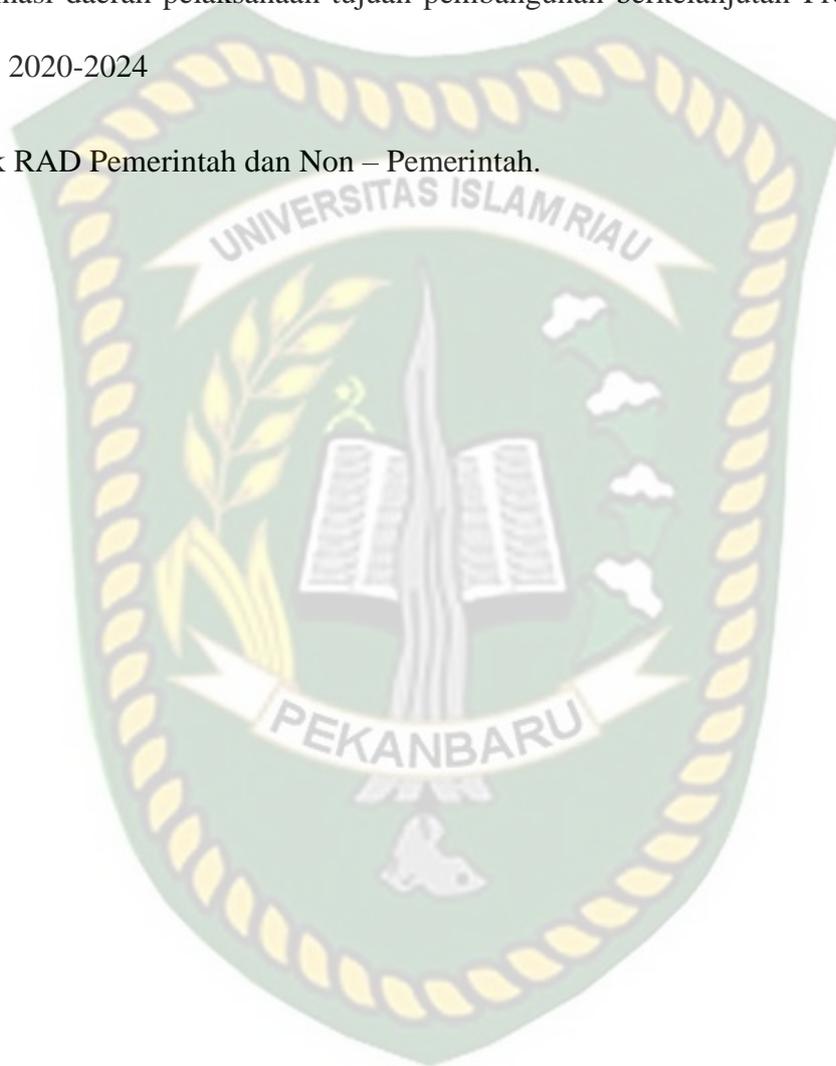
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

Peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018

Peraturan Gubernur No 33 tahun 2018

Dokumen Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 1002 / VI / 2020 tentang tim koordinasi daerah pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Matrik RAD Pemerintah dan Non – Pemerintah.



Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: ~~103~~ JA_UIR/FS-5/2021

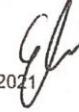
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Wandi Saputra
Npm : 177110522
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Koordinasi Filantropi Dengan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau (Studi Pilar Sosial).
Persentase Plagiasi : 16 % (136 Halaman)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 November 2021


Indra Safri,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK 970702230